



REVISI

SMK
BISA-HEBAT
SIAP KERJA • BANTU • MANDIRI • KREATIF



RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT SMK Tahun 2020-2024



REVISI



RENCANA STRATEGIS

DIREKTORAT SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

2020-2024

Penasehat

Wikan Sakarinto, S.T., M.Sc., Ph.D
Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi

Pengarah

Dr. Wardani Sugiyanto, M.Pd.
Direktur Sekolah Menengah Kejuruan

Penanggung Jawab

Arfah Laidiah Razik, S.H, MA – Kasubag Tata Usaha Dit. SMK
Dr. Taufik Damarjati, MT. – Koordinator Bidang Program dan Evaluasi Dit. SMK
Drs. Sutrianto, M.Pd. – Koordinator Bidang Sumber Daya Manusia Vokasi Dit. SMK
Mochamad Widiyanto, S.Pd., M.T. – Koordinator Bidang Penilaian Dit. SMK
Eru Achmad Sutaman, S.Kom., M.M. – Koordinator Bidang Peserta Didik Dit. SMK
Pitoyo Nugroho, S.T., M.BA. – Koordinator Bidang Tata Kelola Dit. SMK

Tim Penyusun

Suharto, SE., MM
Pipin Dwi Nugraheni, S.E
Wisnubroto, S.Sos.

Editor

Ghoza Hayatullah H.U., S.Pd.
Miftahuddin, S.Si

Penerbit

Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan
Komplek Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
Gedung E, Lantai 12 - 13
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN 2020-2024
ISBN:

KATA PENGANTAR

Tuntutan kebutuhan tenaga kerja terampil mendatang menghadapi kompleksitas tantangan perubahan teknologi, globalisasi, dan kebutuhan kualifikasi dan kompetensi sumber daya manusia di pasar kerja masa depan. Kondisi ini perlu diantisipasi dengan strategi pembenahan pendidikan menengah kejuruan secara konseptual maupun operasional menghadapi disrupsi dan turbulensi di era industry 4.0. Pasar global 2020 yang ditandai dengan dimulainya kebebasan keluar masuknya arus barang, jasa dan manusia, membutuhkan dukungan kesiapan sumber daya manusia yang mumpuni. Peran Pendidikan Menengah Kejuruan sebagai penghasil sumber daya manusia sangat penting dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa yang lebih baik dan berkelanjutan telah memperoleh tempat di masyarakat. Pendidikan Menengah Kejuruan akan selalu konsisten dan berkomitmen untuk berperan aktif dalam mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SDGs 2030) yaitu ***“By 2030, substantially increase the number of youth and adults who have relevant skills, including technical and vocational skills, for employment, decent jobs and entrepreneurship”***. Pendidikan Menengah Kejuruan berperan aktif dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia guna mendukung program pembangunan pemerintah pada sektor prioritas melalui penguatan dan pengembangan keunggulan lokal sebagai pilar ketahanan dan pemerataan ekonomi Indonesia.

Untuk menyiapkan generasi emas Indonesia dalam menghadapi tantangan ketenaga kerjaan di era revolusi industri 4.0 Direktorat SMK menyusun Rencana Strategis SMK 2020-2024. Rencana strategis ini adalah upaya yang akan dilakukan Direktorat SMK dalam 3 tahun ke depan guna meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan menengah kejuruan yang berkualitas kepada masyarakat.

Dokumen renstra ini adalah revisi dari renstra sebelumnya yang merupakan gambaran umum arah, bentuk dan strategi kebijakan pendidikan menengah kejuruan guna menghadapi dinamika perkembangan kebutuhan kualifikasi dan kompetensi sumberdaya manusia di masa depan. Dokumen ini disusun dan diformulasikan berdasarkan pengalaman empiris dalam melaksanakan kebijakan pendidikan menengah kejuruan, program pemerintah, *benckmarking* dan hasil riset/kajian dari berbagai pihak/lembaga/institusi dari dalam dan luar negeri. Untuk mewujudkan rencana strategis ini sangat diperlukan dukungan dan komitmen para pemangku kepentingan Pendidikan Menengah Kejuruan untuk berpartisipasi aktif dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan daya saing bangsa.



Jakarta, Mei 2022

Direktur Pembinaan SMK

Dr. Wardani Sugiyanto, M.Pd.

NIP 196403111989101001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	3
DAFTAR ISI.....	5
DAFTAR GAMBAR.....	6
BAB 1. PENDAHULUAN	9
1. LATAR BELAKANG.....	9
2. LANDASAN HUKUM.....	10
3. PARADIGMA PEMBANGUNAN PENDIDIKAN	10
4. KONDISI UMUM	12
A. PERKEMBANGAN POPULASI SMK.....	14
5. Potensi dan Permasalahan.....	18
A. Analisis Lingkungan Strategis.....	19
B. Permasalahan dan Tantangan Pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan Periode 2020-2024.....	25
BAB II. TUJUAN DAN SASARAN	33
1. VISI-MISI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.....	33
2. TUJUAN DAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN.....	35
3. SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA SASARAN.....	36
4. TATA NILAI	37
BAB III. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KEBIJAKAN....	42
1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN PENDIDIKAN NASIONAL.....	42
2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN SMK	44
3. KERANGKA REGULASI.....	60
4. KERANGKA KELEMBAGAAN	61
BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....	64
1. TARGET KINERJA	64
2. KERANGKA PENDANAAN.....	68
3. SISTEM PEMANTAUAN DAN EVALUASI.....	68
BAB V. PENUTUP	74

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Tema Pendidikan Nasional 2005-2020	12
Gambar 2. Persentase Anggaran Peningkatan Mutu dan Akses Tahun Anggaran 2019.....	12
Gambar 3. Capaian Pembangunan Fisik dan Kompetensi 2016-2019	13
Gambar 4. APK dan APM SMK 2015-2018.....	13
Gambar 5. Perbandingan Persentase Jumlah SMA dan SMK di Indonesia.....	14
Gambar 6. Peningkatan Jumlah Siswa dan Sekolah SMK tahun 2014-2019	14
Gambar 7. Persentase SMK berdasarkan Status tahun 2015-2019	15
Gambar 8. Sebaran Proporsi Jumlah SMK Setiap Gugus Pulau.....	15
Gambar 9. Persebaran dan Proporsi Jumlah SMK Setiap Gugus Pulau.....	16
Gambar 10. Persentase Pertumbuhan Siswa SMK per Bidang Keahlian	17
Gambar 11. Distribusi SMK berdasarkan Status per Provinsi tahun 2019.....	18
Gambar 12. Network Readiness Indeks Negara-Negara di Asia	20
Gambar 13. Tingkat Pendidikan Pekerja di Indonesia Sumber: Sakernas Agustus 2019	21
Gambar 14. Perbandingan Produktifitas Sektor Ekonomi Sumber: Sakernas Agustus 2019	21
Gambar 15. Proyeksi kebutuhan tenaga kerja sektor industri per wilayah (%).....	24
Gambar 16. Proyeksi Kebutuhan Tenaga Kerja Lulusan SMK	25
Gambar 17. Skema Biaya Satuan Pendidikan Sumber: PP No. 48 Tahun 2008	26
Gambar 18. Neraca Pendidikan Daerah.....	27
Gambar 19. Pembiayaan Pendidikan di Daerah Sumber: Data Analisis Supervisi BOS 2018.....	28
Gambar 20. Data Akreditasi SMK Sumber : BAN SM 2019	30
Gambar 21. Jenis Sertifikasi profesi	48
Gambar 22. Skema Konsep Center of Excellence SMK	55

The background features a stylized cityscape with various buildings and trees. Overlaid on this are several large, semi-transparent, colorful shapes: a large orange semi-circle at the top, a pink semi-circle on the left, a light green semi-circle on the right, and a blue semi-circle at the bottom. Two dark grey rectangular boxes with white text are positioned in the center.

BAB I

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

- A. LATAR BELAKANG
- B. LANDASAN HUKUM
- C. PARADIGMA PEMBANGUNAN PENDIDIKAN
- D. KONDISI UMUM
 - 1. Perkembangan SMK
- E. Potensi dan Permasalahan
 - 2. Analisis Lingkungan Strategis
 - 3. Permasalahan dan tantangan Pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan Periode 2020-2024

1. LATAR BELAKANG

Pendidikan merupakan investasi pembangunan sumber daya manusia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pasal 31 ayat (1) menyatakan bahwa “setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”. Pasal tersebut secara jelas mengamanatkan serta mewajibkan negara untuk menyediakan akses pendidikan seluas-luasnya kepada setiap warga negara. Pemerintah harus menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang menjamin pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan bagi setiap warna guna mencapai tujuan pendidikan nasional yaitu mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dalam rangka melaksanakan amanat tersebut, Direktorat SMK berupaya memiliki kemampuan dan kesanggupan untuk menanggapi tuntutan masa depan yang tersurat dalam: (1) nawa cita, (2) rencana pembangunan jangka panjang nasional (RPJPN), (3) rencana induk percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia (MP3I), (4) keanekaragaman kebutuhan masyarakat khususnya dunia kerja, (5) kemajuan teknologi dan agenda Making Indonesia 4.0, serta (6) tuntutan globalisasi, untuk dituangkan melalui program- program dalam rencana strategis 2020-2024.

Direktorat SMK bertanggung jawab untuk merumuskan kebijakan pengembangan pendidikan menengah kejuruan, mengembangkan program tata kelola dan penjaminan mutu pendidikan menengah kejuruan serta melakukan bimbingan teknis dan evaluasi pengelolaan pendidikan menengah kejuruan guna menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi dan kompetensi pada jenjang menengah untuk mendukung program pembangunan nasional dan peningkatan daya saing bangsa.

Dalam rangka mewujudkan layanan pendidikan menengah kejuruan yang berkualitas, maka disusunlah Rencana Strategis (Renstra) Direktorat SMK untuk periode 2020-2024. Renstra Direktorat SMK merupakan bagian yang koheren dan penting dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Renstra ini juga akan menjadi dasar untuk penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Renstra ini juga akan menjadi *point of view* atau landasan dasar dalam pelaksanaan evaluasi kinerja dan pembuatan Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) di tingkat Direktorat SMK.

2. LANDASAN HUKUM

Rencana strategis ini merupakan perwujudan dari penerapan berbagai peraturan perundangan yang meliputi dan rancangan regulasi yang dinilai perlu untuk jadi justifikasi yuridis dalam pengembangan SMK periode 2020-2024:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005—2025;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Permendikbud Nomor 34 tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan dan Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK)
11. Permendikbud Nomor 9 Tahun 2020 Perubahan atas Permendikbud Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemendikbud

3. PARADIGMA PEMBANGUNAN PENDIDIKAN

Penyelenggaraan pendidikan harus memperlakukan, memfasilitasi dan mendorong peserta didik menjadi subjek pembelajar mandiri yang bertanggung jawab, kreatif dan inovatif. Pendidikan diupayakan menghasilkan insan yang suka belajar dan memiliki kemampuan belajar yang tinggi. Pembelajar akan mampu menyesuaikan diri dan merespon tantangan baru dengan baik.

1. Pendidikan untuk semua

“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia” adalah amanat konstitusi.

Pendidikan harus dapat diakses oleh setiap orang dengan tidak dibatasi oleh usia, tempat dan waktu. Pemerintah harus menjamin keberpihakan kepada peserta didik yang memiliki hambatan fisik ataupun mental, hambatan ekonomi dan sosial, ataupun kendala geografis.

2. Pendidikan sepanjang hayat

Pendidikan merupakan proses yang berlangsung seumur hidup, yaitu pembelajaran sejak lahir hingga akhir hayat. Pendidikan harus diselenggarakan dengan sistem terbuka yang memungkinkan fleksibilitas pilihan dan waktu penyelesaian program lintas satuan dan jalur pendidikan.

3. Pendidikan sebagai suatu gerakan

Pemerintah memang bertanggung jawab menyelenggarakan pendidikan yang sebaik-baiknya bagi semua warga negara. Namun, semua pihak dapat memberi kontribusi dalam penyelenggaraan pendidikan agar hasilnya menjadi optimal. Penyelenggaraan pendidikan harus disikapi sebagai suatu gerakan, yang mengintegrasikan semua potensi negeri dan peran aktif seluruh masyarakat.

4. Pendidikan menghasilkan pembelajar

Penyelenggaraan pendidikan harus memperlakukan, memfasilitasi dan mendorong peserta didik menjadi subjek pembelajar mandiri yang bertanggung jawab, kreatif dan inovatif. Pendidikan diupayakan menghasilkan insan yang suka belajar dan memiliki kemampuan belajar yang tinggi. Pembelajar akan mampu menyesuaikan diri dan merespon tantangan baru dengan baik.

5. Pendidikan membentuk karakter

Pendidikan berorientasi pada pembudayaan, pemberdayaan, pembentukan kepribadian. Kepribadian dengan karakter unggul yang antara lain bercirikan kejujuran, akhlak mulia, kemandirian, serta kecakapan hidup.

6. Sekolah yang menyenangkan

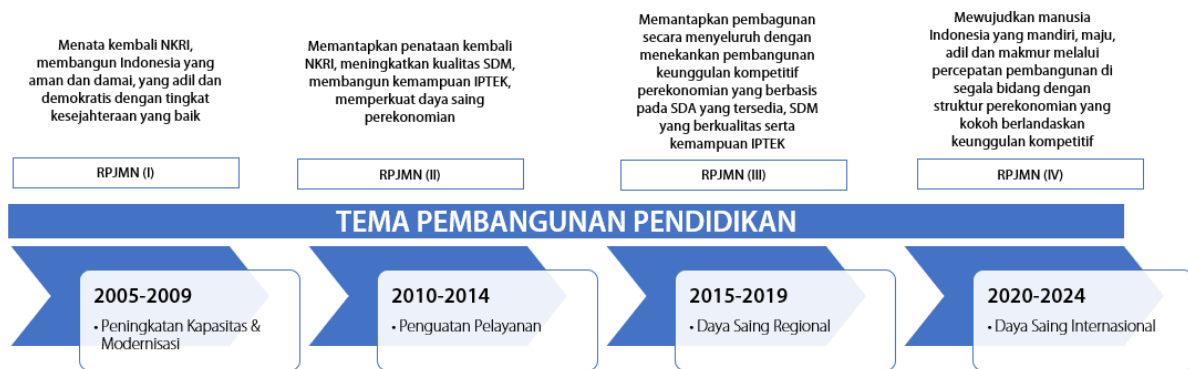
Sekolah sebagai satuan pendidikan yang utama merupakan suatu ekosistem. Suatu tempat yang di dalamnya terjadi hubungan saling ketergantungan antara manusia dengan lingkungannya. Sekolah harus menjadi tempat yang menyenangkan bagi manusia yang berinteraksi di dalamnya, baik siswa, guru, tenaga pendidik, orang tua siswa dan pelaku lainnya.

7. Pendidikan membangun Kebudayaan

Pendidikan memiliki hubungan yang amat erat dengan kebudayaan. Sebagian dari paradigma yang disebut di atas mengandung aspek kebudayaan atau proses budaya. Pendidikan juga pada dasarnya adalah proses membangun kebudayaan atau membentuk peradaban. Pada sisi lain, pelestarian dan pengelolaan kebudayaan adalah untuk menegaskan jati diri dan karakter bangsa Indonesia.

4. KONDISI UMUM

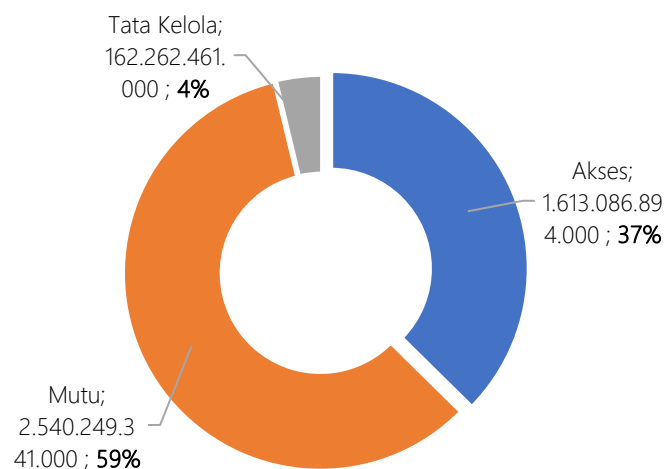
Secara umum, tema rencana strategis pengelolaan sekolah kejuruan sejalan dengan Roadmap pengembangan pendidikan di Indonesia. Pemerintah dalam perencanaan pembangunan pendidikan jangka panjang mencanangkan tema fokus pendidikan setiap kurun lima (5) tahun. Hal tersebut merupakan amanat yang termaktub dalam grand design pembangunan nasional dimana manifestasinya tertera dalam dokumen RPJMN (2005-2025). Dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang tersebut dibagi beberapa fase pembangunan pendidikan dalam 4 fase yang tercermin dalam keterangan gambar di bawah ini :



Gambar 1 Tema Pendidikan Nasional 2005-2020

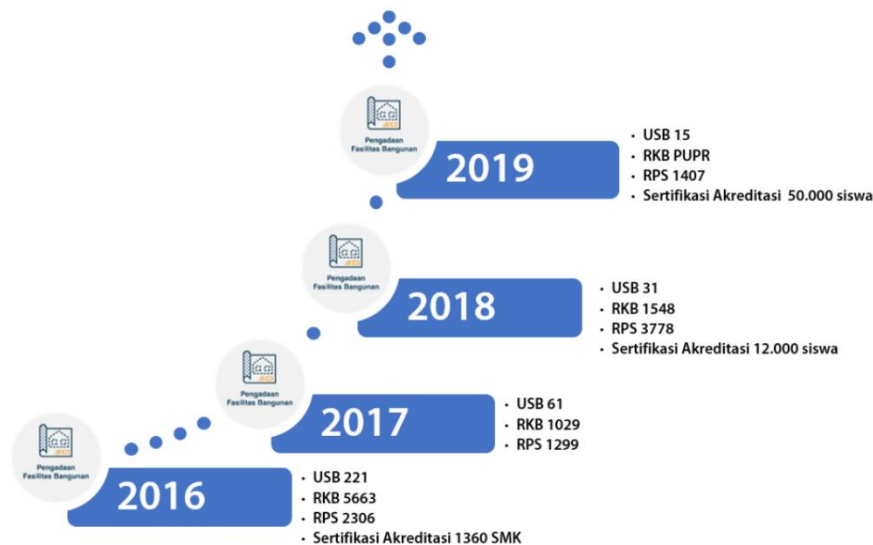
Pembangunan SMK ke depan tidak akan pernah lepas dari arahan umum yang telah tercantum dalam tema pembangunan pendidikan. Pada medio 2020-2024 fokus pembangunan pendidikan adalah pada peningkatan daya saing internasional. Hal tersebut sejalan dengan rencana strategis pada periode pembangunan sebelumnya.

Secara umum intervensi pembangunan pendidikan SMK berfokus pada dua (2) hal yaitu pembangunan akses dan mutu pendidikan. Hal tersebut terepresentasi dari program kerja Direktorat dalam postur anggaran sebagai berikut:



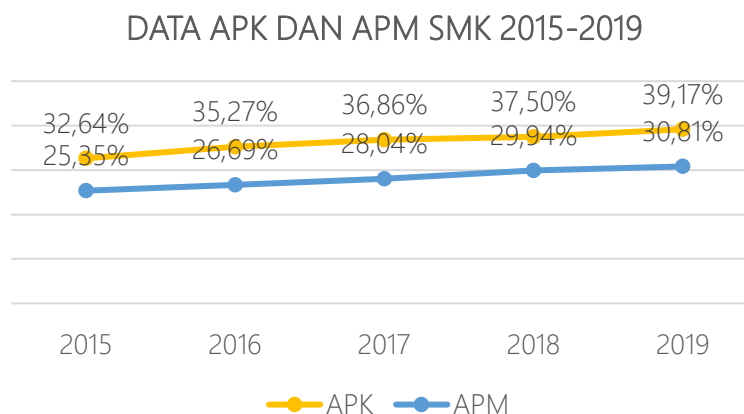
Gambar 2. Persentase Anggaran Peningkatan Mutu dan Akses Tahun Anggaran 2019

Dari intervensi pembangunan mutu dan akses tersebut telah menghasilkan capaian yang cukup signifikan dalam kurun 5 tahun terakhir yaitu peningkatan jumlah sekolah dan siswa. Hal tersebut menandakan animo masyarakat terhadap pendidikan kejuruan semakin tinggi. Di sisi lain peningkatan tersebut mengindikasikan berhasilnya pelayanan pendidikan SMK yang dikelola oleh Direktorat SMK sehingga membuat angka partisipasi masyarakat terhadap pendidikan kejuruan semakin terlihat progresifitasnya. Capaian pembangunan fisik diantaranya ruang kelas baru, ruang praktik siswa dan unit sekolah baru pun memberikan kontribusi penting dalam perbaikan akses layanan pendidikan SMK.



Gambar 3. Capaian Pembangunan Fisik dan Kompetensi 2016-2019

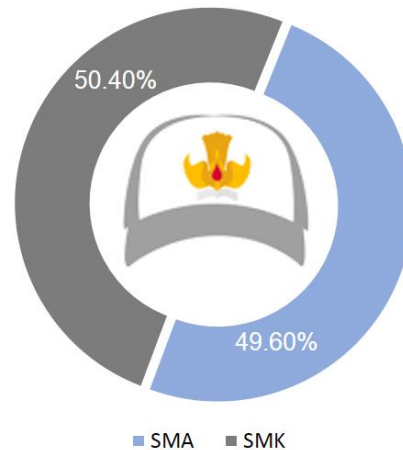
Terkait dengan angka partisipasi kasar (APK) dan angka partisipasi murni (APM) satuan pendidikan SMK dalam 5 tahun belakangan pun menandakan adanya peningkatan yang bisa dibbilang signifikan. Rata-rata peningkatan APM dan APK untuk SMK 1-2%. Peningkatan tersebut setidaknya menandakan 2 hal, terjadi peningkatan jumlah peserta didik yang masuk ke SMK dan semakin sedikitnya angka putus sekolah dari SMP.



Gambar 4. APK dan APM SMK 2015-2018

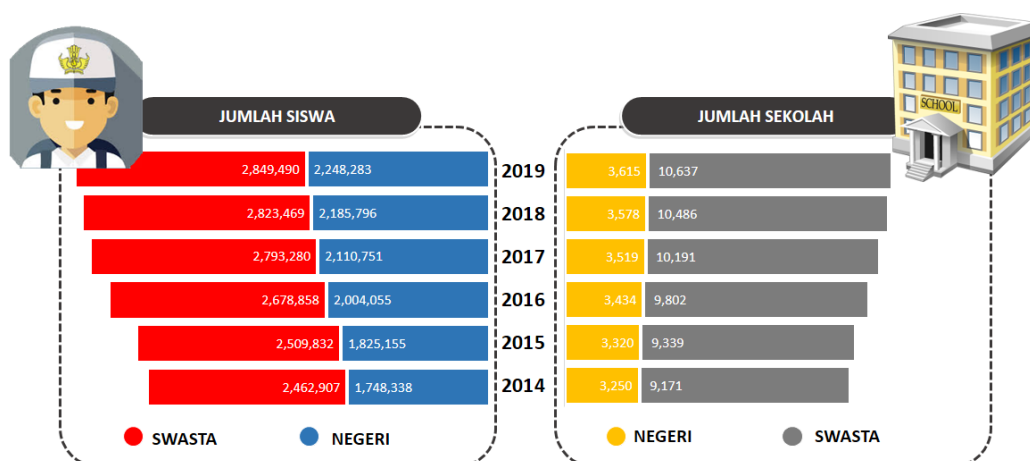
A. PERKEMBANGAN POPULASI SMK

Secara umum dalam konteks perkembangan perbandingan jumlah SMA dengan SMK, terjadi signifikansi perubahan dalam kurun 1 (satu) dekade terakhir dari yang awalnya sekolah menengah di Indonesia didominasi oleh SMA sampai dengan saat ini jumlah SMK lebih banyak dibandingkan dengan SMA. Data Pokok Pendidikan tahun 2019 menunjukkan sebagai berikut:

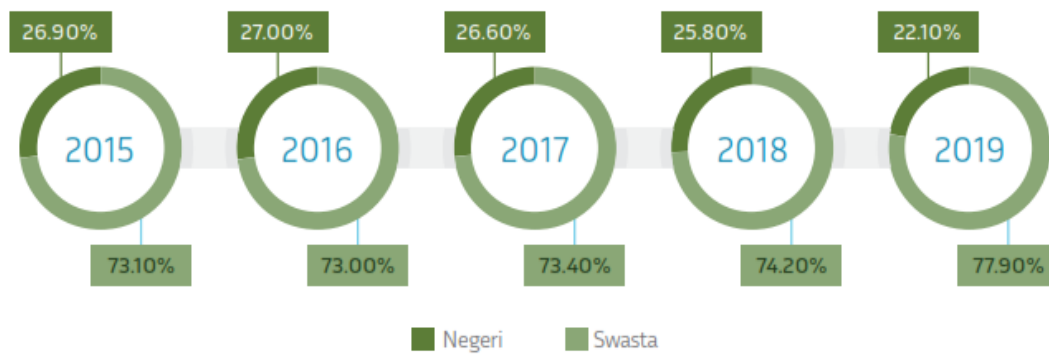


Gambar 5. Perbandingan Persentase Jumlah SMA dan SMK di Indonesia

Meningkatnya APK dan APM jelas berimplikasi terhadap peningkatan jumlah siswa. Perkembangan populasi jumlah siswa siswa setiap tahunnya meningkat sebanyak 2-4% sedangkan pertumbuhan jumlah sekolah berada diangka 1-2%. Kenaikan tersebut jelas mengindikasikan trend positif dan secara psikologis masyarakat semakin percaya untuk melanjutkan pendidikan menengah di SMK. Pada setiap tahun, peminat sekolah di swasta lebih tinggi dibandingkan dengan sekolah negeri. Hal ini sejalan dengan peningkatan jumlah sekolah swasta yang jauh lebih banyak dibandingkan jumlah sekolah negeri.



Gambar 6. Peningkatan Jumlah Siswa dan Sekolah SMK tahun 2014-2019
Sumber: Statistika Kemendikbud, 2014-2019

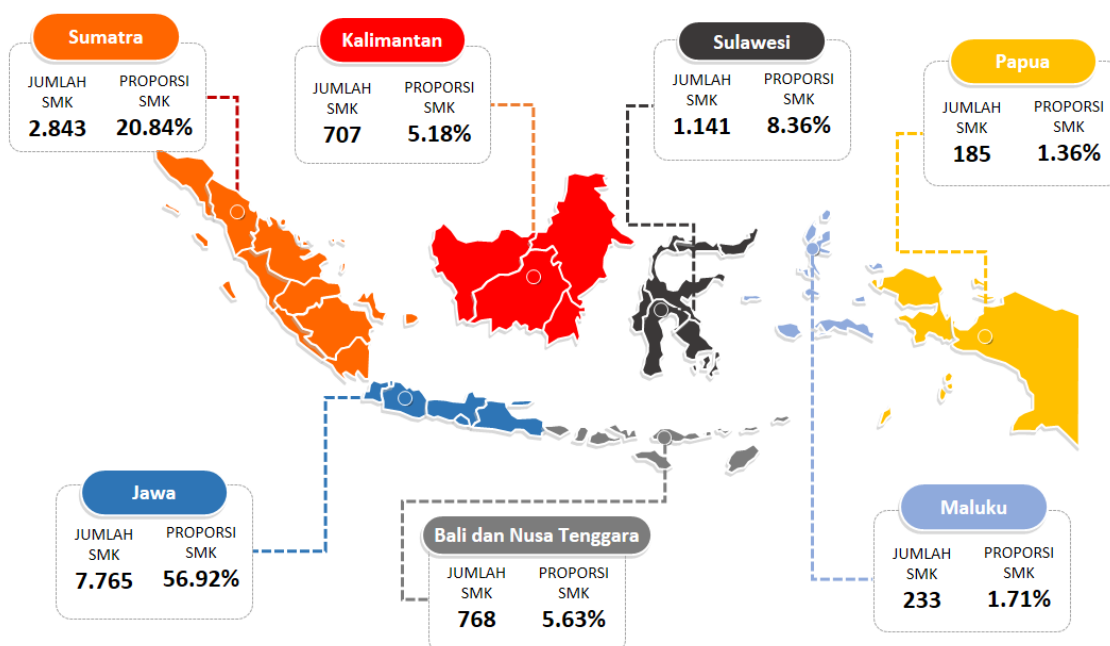


Gambar 7. Persentase SMK berdasarkan Status tahun 2015-2019

Dalam konteks perkembangan SMK berdasarkan status sekolah, dari tahun 2016-2019 selalu terjadi peningkatan persentase jumlah SMK yang diselenggarakan oleh masyarakat. Di sisi lain persentase SMK yang didirikan oleh Pemerintah terus mengalami penurunan.

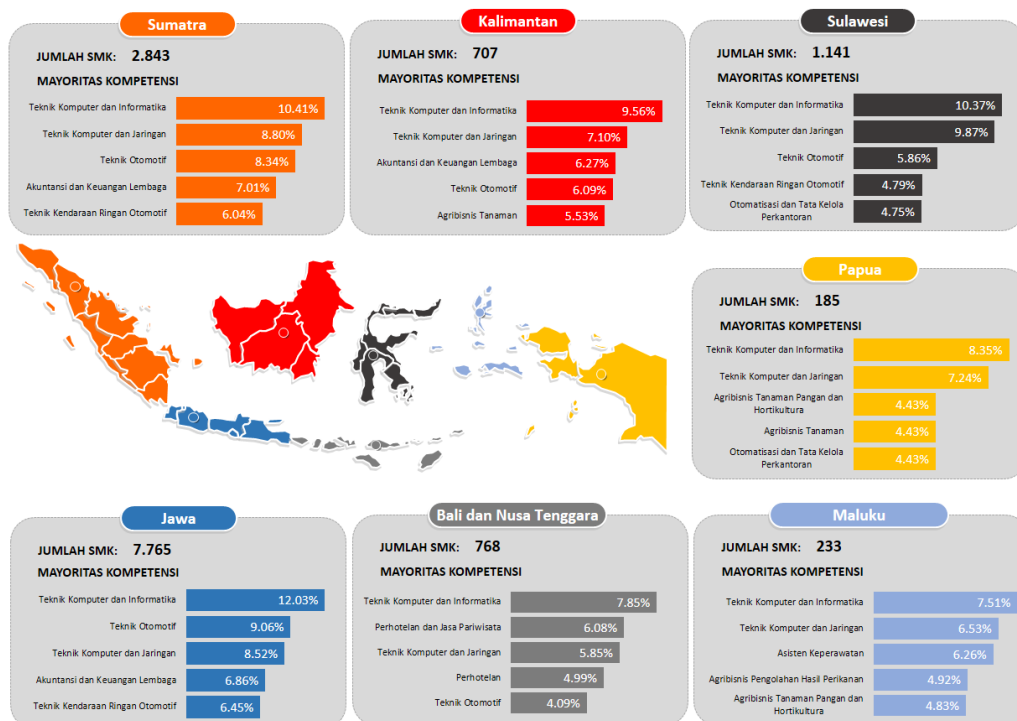
Dalam persebaran jumlah SMK yang mencapai 14.156 di Indonesia, populasi terbanyak adalah pada Pulau Jawa dan Sumatra dengan proporsi SMK kedua pulau tersebut mencapai sekitar 78%. Tingginya SMK pada area tersebut dikarenakan oleh tingginya jumlah dan pertumbuhan lapangan pekerjaan pada kedua pulau tersebut dan juga populasi demografinya. Sedangkan proporsi paling sedikit adalah pulau Papua yaitu sebesar 1,36%. Jika kita lihat pada grafik di atas, jumlah SMK di Pulau Jawa sebesar 7.765 SMK (56,92%), Pulau Sumatera sebesar 2.843 SMK (20,84%), Sulawesi sebesar 1.141 SMK (8,36%), Bali dan Nusa Tenggara sebesar 768 SMK (5,63%), Kalimantan sebesar 707 SMK (5,18%), Maluku sebesar 233 SMK (1,71%), dan Papua sebesar 185 (1,36%).

Gambar 8. Sebaran Proporsi Jumlah SMK Setiap Gugus Pulau



Sumber: cut-off Dapodik Januari 2020 (Data diolah)

SMK di Indonesia memiliki 146 kompetensi dimana dari 146 kompetensi tersebut, sekitar 60% dari proporsi kompetensi hanya diisi oleh 10 kompetensi utama. Kompetensi-kompetensi tersebut dimiliki oleh mayoritas SMK di Indonesia karena permintaan industri akan kompetensi tersebut dinilai cukup tinggi dan animo masyarakat untuk mendaftar pada kompetensi tersebut besar pula. Kompetensi-kompetensi utama yang dimiliki oleh SMK di Indonesia adalah teknik komputer dan informatika sebesar 11% atau 7.354 SMK, Teknik Komputer dan Jaringan sebanyak 8,42% atau 5.631 SMK, Teknik Otomotif sebesar 7,94% atau 5.309 SMK, Akuntansi dan Keuangan Lembaga sebanyak 6,25% atau sebanyak 4.179 SMK, Teknik Kendaraan Ringan Otomotif sebanyak 5,74% atau sebanyak 3836 SMK, Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran sebanyak 5,39% atau sebanyak 3.605 SMK, Teknik dan Bisnis Sepeda Motor sebanyak 4,77% atau sebanyak 3.187 SMK, Multimedia, Bisnis Daring dan Pemasaran sebanyak 2,78% atau sebanyak 1.857 SMK, dan Rekayasa Perangkat Lunak sebanyak 1,94% atau sebanyak 1.298 SMK.

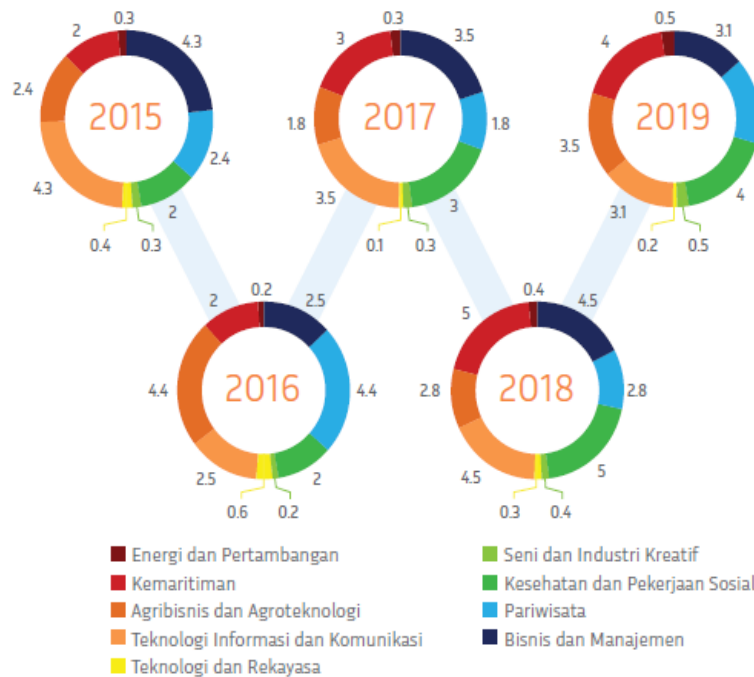


Gambar 9. Persebaran dan Proporsi Jumlah SMK Setiap Gugus Pulau

Sumber: cut-off Dapodik Januari 2020 (Data diolah)

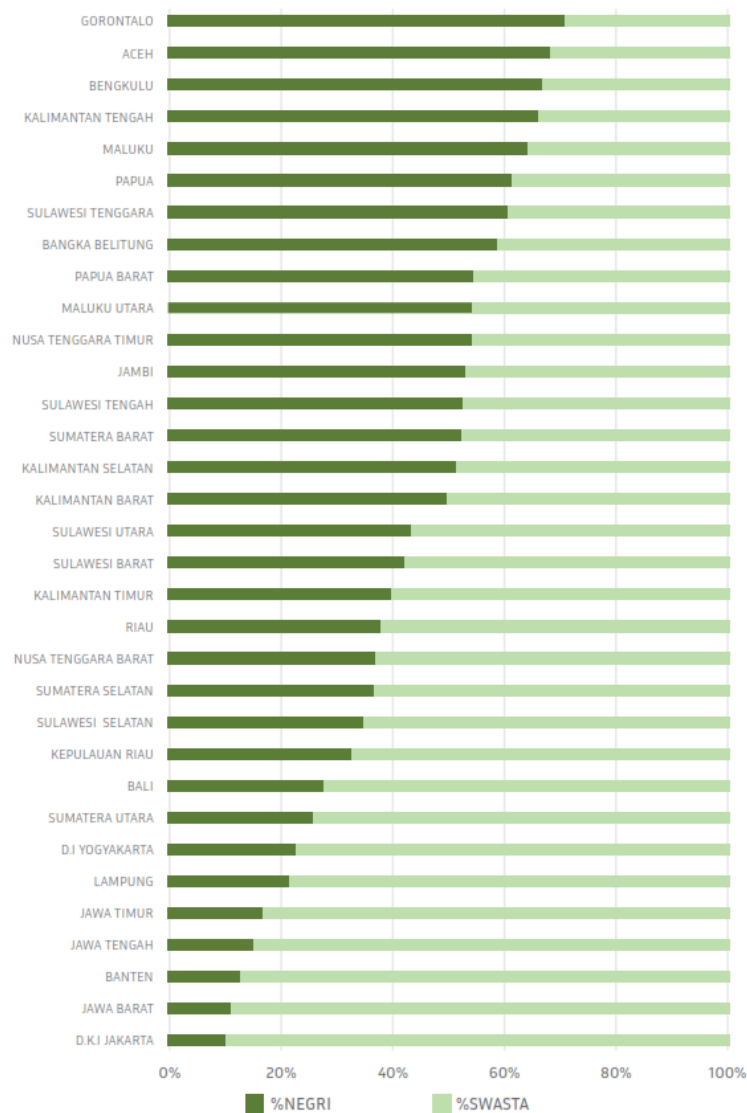
Secara agregat, jumlah siswa dan jumlah SMK selalu terjadi peningkatan setiap tahunnya. Hampir di setiap Provinsi mengalami peningkatan eskalatif baik jumlah maupun siswa. Penambahan tersebut menandakan beberapa hal seperti tingkat aksesibilitas pendidikan menengah kejuruan selalu meningkat dan jumlah sekolah maupun siswa menunjukkan peningkatan.

Gambar 10. Persentase Pertumbuhan Siswa SMK per Bidang Keahlian



Pada tingkat provinsi dapat dilihat bahwa minat masyarakat dalam mendirikan SMK sangat tinggi dengan 17 provinsi lebih didominasi oleh SMK yang didirikan oleh masyarakat dibandingkan dengan SMK yang didirikan oleh pemerintah daerah. Minat mendirikan SMK oleh masyarakat sangat tinggi di seluruh provinsi di pulau Jawa dan Bali serta sebagian besar provinsi di Pulau Sumatera sementara sebagian besar provinsi di Kalimantan dan Indonesia Timur masih mengandalkan peran pemerintah dalam mendorong pertumbuhan SMK.

Dengan potensi tersebut dalam mendorong pertumbuhan SMK ke depan, Pemerintah dapat memfokuskan sumber daya yang dimiliki untuk lebih mengembangkan akses SMK di luar wilayah Jawa, Bali dan Sumatera. Sementara di provinsi-provins dengan minat masyarakat yang tinggi pemerintah hanya perlu mendorong pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam mendirikan SMK-SMK dengan program studi keahlian yang memang dibutuhkan untuk mendukung kebutuhan wilayah, nasional atau bahkan negara lain.



Gambar 11. Distribusi SMK berdasarkan Status per Provinsi tahun 2019

5. Potensi dan Permasalahan

Menghadapi disrupsi teknologi di era revolusi industri 4.0 dan tantangan globalisasi, problematika SMK dalam menghasilkan lulusan yang berkualitas untuk menghadapi pasar kerja ke depan adalah masalah kuantitas dan kualitas guru produktif, kualitas pembelajaran, kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana, dukungan pembiayaan serta kepemimpinan dan pengelolaan

organisasi. Secara lebih luas permasalahan dan tantangan pembangunan pendidikan SMK 2020-2024 diuraikan dalam beberapa faktor internal dan eksternal sebagai berikut:.

A. Analisis Lingkungan Strategis

Analisis lingkungan strategis ini sangat berfungsi sebagai basis analisa pengambilan kebijakan. Mengingat bahwa sektor pendidikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional maupun global oleh karena itu pergeseran makro yang bersifat nasional maupun global-internasional akan mempengaruhi pembangunan sektor tersebut. Oleh karena itu kecenderungan global yang memiliki implikasi turunan terhadap pembangunan sektoral dalam hal ini adalah pendidikan menjadi pembahasan utama.

1) Bonus Demografi dan Pembangunan SDM

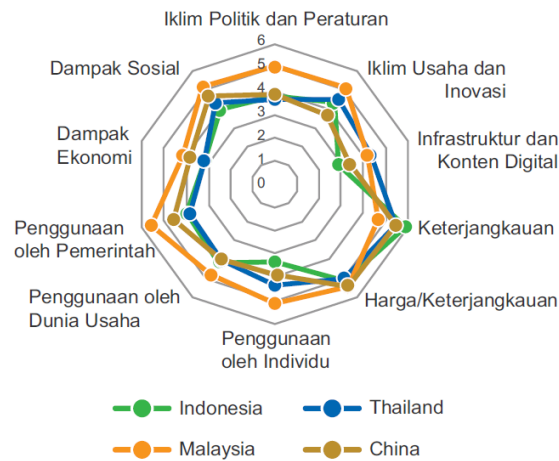
Struktur penduduk Indonesia ditandai dengan tingginya proporsi penduduk usia produktif. Pada tahun 2018, penduduk usia produktif di Indonesia mencapai 68,6% atau 181,3 juta jiwa dengan angka ketergantungan usia muda dan tua yang rendah, yaitu 45,7%. Perubahan struktur penduduk ini akan membuka peluang bagi Indonesia untuk mendapatkan bonus demografi (*demographic dividend*) yang dalam jangka menengah dan panjang akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan menghantarkan Indonesia menjadi negara berpenghasilan menengah ke atas. Bonus demografi ini akan diperoleh dengan prasyarat utama tersedianya sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing.

Jumlah penduduk usia produktif yang besar tersebut harus dimanfaatkan agar Indonesia dapat memaksimalkan bonus demografi. Apabila tidak dikelola dengan baik, dapat menyebabkan tingginya tingkat pengangguran, konflik sosial, serta tekanan pada pangan dan lingkungan. Selain itu, perubahan struktur umur penduduk yang cepat juga membawa implikasi terhadap penduduk yang menua (*ageing population*) yang tidak produktif. Perubahan struktur umur penduduk tersebut dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia dengan memberikan perhatian pada pembangunan manusia berdasarkan siklus hidup. Pembangunan Indonesia 2020-2024 ditujukan untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter.

2) Revolusi Industri dan Ekonomi Digital

Pada tahun 2018, Pemerintah telah meluncurkan gerakan *Making Indonesia 4.0*. Gerakan ini sejalan dengan era digitalisasi yang memfasilitasi pengintegrasian informasi untuk tujuan peningkatan produktivitas, efisiensi, dan kualitas layanan.

Pemanfaatan ekonomi digital ke depan memiliki potensi yang besar untuk tujuan peningkatan nilai tambah ekonomi. Sebagai contoh, pemanfaatan *Industry 4.0* sepanjang rantai nilai dapat meningkatkan efisiensi hulu-hilir serta kontribusi nilai tambah industri secara agregat dalam perekonomian.



Sumber: Global Information Technology Report, World Economic Forum (2016)

Gambar 12. Network Readiness Indeks Negara-Negara di Asia

Namun tantangan yang dihadapi Indonesia dalam era digitalisasi juga cukup besar. Dari sisi kesiapan inovasi untuk menghadapi revolusi digital seperti yang ditunjukkan oleh *Network Readiness Index*, Indonesia berada pada peringkat 73 dari 139 negara. Sementara negara-negara yang setara memiliki kesiapan yang lebih baik, seperti Malaysia (peringkat 31), Turki (48), China (59), Thailand (62). Indonesia memiliki keunggulan dalam harga, namun jauh tertinggal dalam infrastruktur dan pemanfaatan oleh masyarakat.

Kesiapan Indonesia untuk mengadopsi dan mengeksplorasi teknologi digital yang mampu mendorong transformasi dalam pemerintahan, model usaha dan pola hidup masyarakat juga dianggap kurang. Hal ini ditunjukkan oleh data *World Digital Competitiveness Ranking* tahun 2017 dimana Indonesia berada pada peringkat ke 59 dari 63 negara. Cara beradaptasi, integrasi informasi teknologi, dan kerangka peraturan menjadi isu-isu yang perlu diperbaiki agar Indonesia dapat memanfaatkan kemajuan teknologi digital bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup.

Tantangan lain yang dihadapi oleh Indonesia berkaitan dengan pengembangan SDM dan persaingan usaha. Era digitalisasi membawa dampak pada perubahan pola bekerja dan berpotensi menghilangkan pekerjaan yang bersifat sederhana dan repetitif. Di sisi lain, pola perdagangan dan penyediaan layanan berbasis daring serta penggunaan pembayaran nontunai menjadikan banyak model usaha konvensional tidak lagi relevan. Kondisi ini mengharuskan adanya kebijakan dan pola adaptasi yang menyeluruh dalam pemanfaatan transformasi digital bagi keberlanjutan dan pemerataan pertumbuhan ekonomi, serta perbaikan kualitas kehidupan sosial dan lingkungan.

3) Pertumbuhan Ekonomi Sektoral

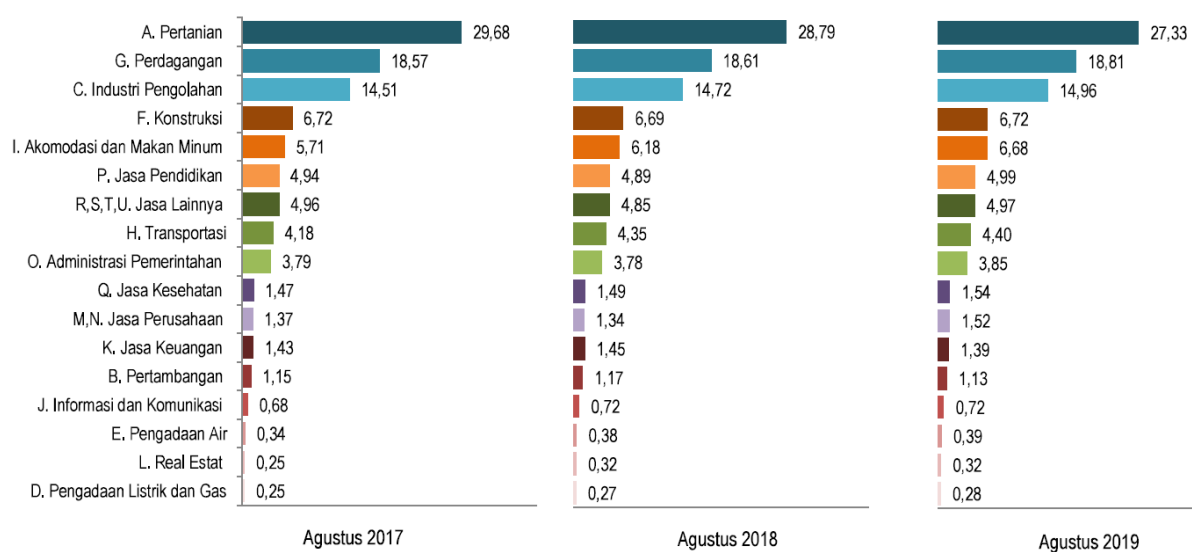
Setelah era reformasi pada tahun 1998, Indonesia belum mampu melanjutkan transformasi sosial ekonomi yang terhenti akibat krisis. Rata-rata pertumbuhan ekonomi potensial Indonesia terus turun dari sebelumnya mencapai 6% pada periode 1990-2000 hingga mencapai rata-rata sekitar 5% pada periode 2000-2015. Kondisi transformasi struktural yang berjalan lambat ini juga ditandai dengan kontribusi PDB industri yang menurun menjadi 19,9%. Di sisi lain, kontribusi PDB sektor primer sebesar 20,9% dan kontribusi PDB sektor jasa terus meningkat menjadi sekitar 59,2% pada tahun 2018.

Karakteristik Penduduk Bekerja	Agustus 2015		Agustus 2016		Agustus 2017		Agustus 2018		Agustus 2019	
	juta orang (2)	persen (%) (3)	juta orang (4)	persen (%) (5)	juta orang (6)	persen (%) (7)	juta orang (8)	persen (%) (9)	juta orang (10)	persen (%) (11)
Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan										
SD ke Bawah	50,83	44,27	49,97	42,20	50,98	42,13	50,46	40,69	50,18	39,66
Sekolah Menengah Pertama	20,70	18,03	21,36	18,04	21,72	17,95	22,43	18,09	22,62	17,88
Sekolah Menengah Atas	19,81	17,25	20,41	17,24	21,13	17,46	22,34	18,01	23,19	18,33
Sekolah Menengah Kejuruan	10,84	9,44	12,17	10,28	12,59	10,40	13,68	11,03	14,84	11,73
Diploma I/II/III	3,08	2,68	3,41	2,88	3,28	2,71	3,45	2,78	3,41	2,70
Universitas	9,56	8,33	11,09	9,36	11,32	9,35	11,65	9,40	12,27	9,70
Jumlah	114,82	100,00	118,41	100,00	121,02	100,00	124,01	100,00	126,51	100,00

Gambar 13. Tingkat Pendidikan Pekerja di Indonesia

Sumber: Sakernas Agustus 2019

Peningkatan PDB sektor jasa menunjukkan adanya transisi sumber pertumbuhan dari sektor primer ke tersier. Namun transisi ekonomi tersebut belum mampu mendorong pertumbuhan yang lebih tinggi. Sektor jasa yang menyerap perpindahan tenaga kerja dari sektor primer didominasi oleh sektor jasa informal dengan kontribusi pertumbuhan yang rendah. Sektor industri, yang memiliki potensi terbesar untuk mendorong pertumbuhan, masih menghadapi tantangan kenaikan upah tenaga kerja yang belum diikuti dengan peningkatan produktivitas yang setara.



Gambar 14. Perbandingan Produktifitas Sektor Ekonomi

Sumber: Sakernas Agustus 2019

Masalah produktivitas yang rendah ini berkaitan dengan kualitas SDM yang rendah, dimana tenaga kerja masih didominasi oleh lulusan SD (39,66%), sementara tidak semua tenaga kerja lulusan pendidikan yang lebih tinggi memiliki kesiapan dan kapasitas sesuai kebutuhan dunia kerja. *Mismatch* keterampilan, kesenjangan kualitas pendidikan antarwilayah, keterbatasan talenta untuk siap dilatih dan bekerja menjadi isu-isu yang perlu ditangani dalam peningkatan produktivitas.

4) Elastisitas *Demand* Tenaga Kerja Lulusan SMK

Elastisitas permintaan lulusan tenaga kerja SMK ini memperlihatkan bahwa bagaimana respon atau perubahan penyerapan tenaga kerja lulusan SMK terhadap adanya perubahan pertumbuhan sektor dalam perekonomian. Berdasarkan model elastisitas menunjukkan bahwa sektor yang memiliki elastisitas paling tinggi adalah perdagangan, hotel, dan restoran; serta sektor jasa keuangan, yang memiliki elastisitas satu (1). Artinya, apabila kedua sektor tersebut bertumbuh 1%, maka penyerapan tenaga kerja lulusan SMK di sektor perdagangan, hotel, dan restoran meningkat 1%; dan di sektor jasa keuangan meningkat 1,05%. Sektor yang memiliki elastisitas tertinggi lainnya adalah pertanian, industri, serta transportasi dan komunikasi, dengan nilai elastisitas berturut-turut sebesar 0,89; 0,88; dan 0,85.

Elastisitas Permintaan Tenaga Kerja Lulusan SMK

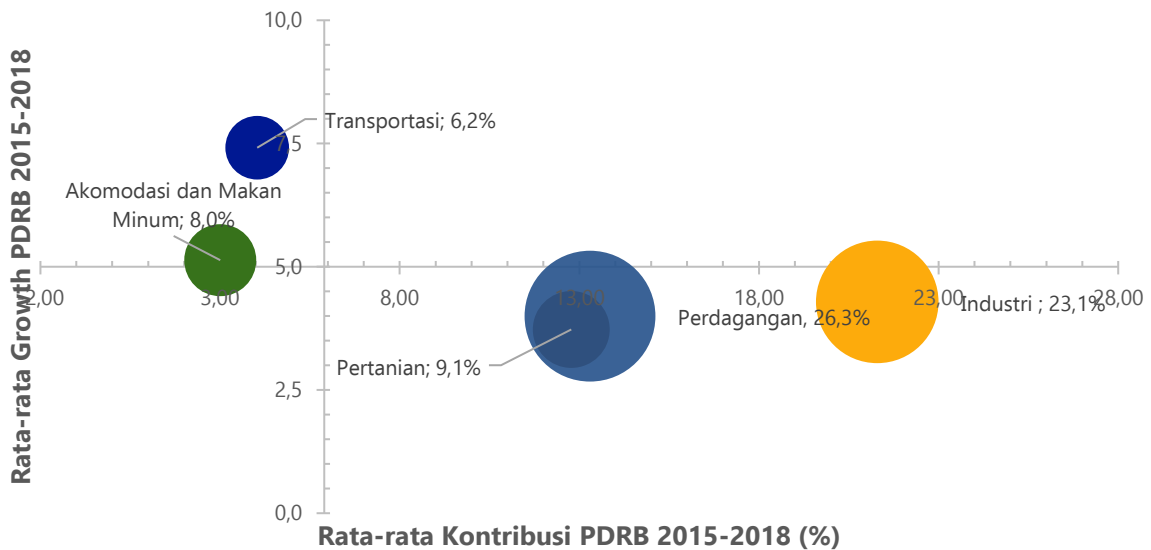
Sektor	Elastisitas
Pertanian	0.89
Pertambangan	0.49
Industri	0.88
LGAM	0.66
Konstruksi	0.79
Perdagangan, Hotel, dan Restoran	1.00
Transportasi dan Komunikasi	0.85
Jasa Keuangan	1.05
Jasa	0.52

Sumber: BPS, Sakernas 2010-2018, diolah oleh Lembaga Demografi FEB UI

Apabila dilihat menurut 17 sektor perekonomian, lima (dari 17 sektor) yang menyerap tenaga kerja lulusan SMK terbesar adalah sektor perdagangan (26,32 persen), industri pengolahan (23,09 persen), pertanian (9,10 persen), akomodasi makan dan minum (7,96 persen), dan transportasi (6,23 persen). Gambar 2.1.6 memperlihatkan pemetaan penyerapan tenaga kerja lulusan SMK terbesar Tahun 2018 dengan rata-rata pertumbuhan dan kontribusi PDB Tahun 2015-2018. Adapun Titik tengah dari gambar di bawah merupakan rata-rata pertumbuhan dan kontribusi 17 sektor ekonomi dalam kurun waktu 2015-2018.

Pemetaan Lima Sektor (dari 17 Sektor) Terbesar Penyerapan Tenaga Kerja Lulusan SMK Tahun 2018 dengan Rata-rata Pertumbuhan dan Kontribusi PDB Tahun 2015-2018

INDONESIA



Sumber: BPS, Sakernas 2015-2018, diolah oleh Lembaga Demografi FEB UI

Apabila dilihat dari sisi kontribusi, sektor industri dan perdagangan kontribusi cukup jauh di atas rata-rata dengan nilai berturut-turut 21,3% dan 13,3%, namun tingkat pertumbuhannya di sekitar rata-rata yakni 4,8% dan 5,1%. Adapun sektor pertanian, memiliki kontribusi di atas rata-rata (12,8%), namun tingkat pertumbuhannya di bawah rata-rata pertumbuhan 17 sektor ekonomi (4%). Di sisi lain, sektor akomodasi, makan, dan minum serta transportasi memiliki kontribusi di bawah rata-rata 17 sektor ekonomi, dengan tingkat pertumbuhan yang cukup tinggi untuk sektor transportasi (7,4%). Artinya, lima sektor terbesar yang menyerap lulusan SMK memiliki kontribusi yang cukup besar dalam perekonomian dengan pertumbuhan yang masih positif meskipun tidak terlalu besar, kecuali sektor transportasi yang memiliki rata-rata pertumbuhan yang cukup tinggi (7,4%).

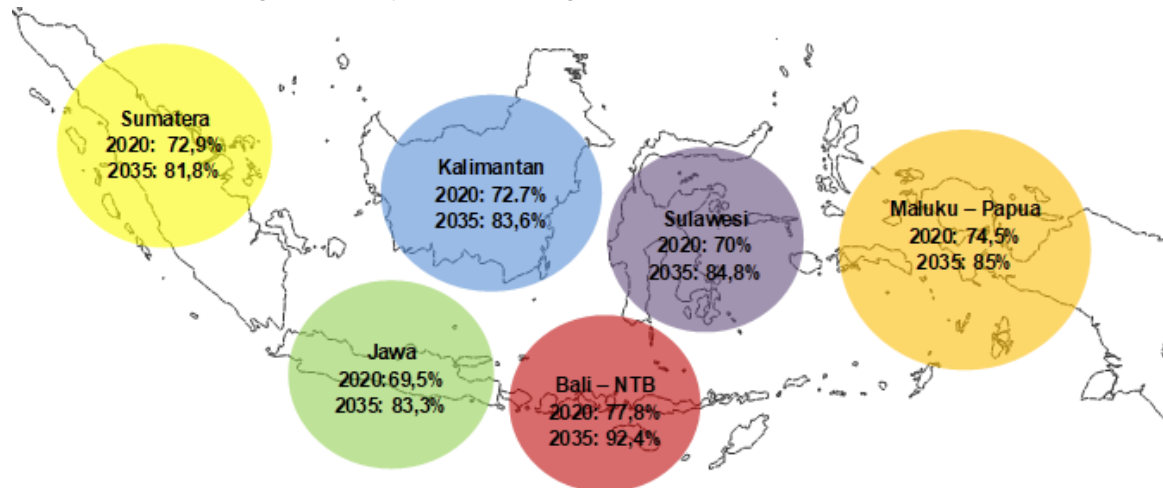
5) Trend Kondisi Kebutuhan Tenaga Kerja Nasional

Dengan memperhatikan dinamika perkembangan pada tahun 2030 diperkirakan Indonesia akan menghadapi kenaikan kebutuhan tenaga kerja terampil sebanyak 60 juta orang yaitu dari awalnya 55 juta orang pada tahun 2012 menjadi 113 juta orang di tahun 2030. Jika kebutuhan ini dikaitkan dengan prioritas pemerintah maka ada beberapa sektor yang seharusnya menjadi orientasi utama bagi perencanaan ketenagakerjaan, antara lain: sektor perikanan dan kemaritiman, sektor pertanian dan sektor pariwisata. Jika pembangunan, pengoperasian dan pengelolaan berbagai infrastruktur dipertimbangkan, maka kebutuhan tenaga kerja pada periode 15 tahun mendatang juga akan muncul di bidang teknologi rekayasa, konstruksi dan transportasi. Era digital yang telah berlangsung juga akan mempengaruhi kebutuhan tenaga kerja.

Menurut proyeksi kebutuhan tenaga kerja sektor industri yang disusun oleh Kementerian Perindustrian (2015), sampai dengan tahun 2020 komposisi kebutuhan tenaga kerja menurut

subsektor industri diperkirakan relatif stabil. Kebutuhan tenaga kerja dari sub-sektor makanan akan mencapai 29% dari seluruh kebutuhan tenaga kerja sektor industri bukan migas. Kebutuhan subsektor garmen akan mencapai 15,5% dan subsektor industri kayu dan barang kayu mencapai 10% dari total kebutuhan tenaga kerja industri. Kebutuhan tenaga kerja sektor industri di Jawa secara umum cenderung menurun (dari 432 ribu pada tahun 2015 menjadi 424 ribu pada tahun 2020 menjadi 386 ribu pada tahun 2035). Sebaliknya, kebutuhan tenaga kerja sektor industri di provinsi-provinsi lain di luar Jawa justru meningkat.

Pada tahun 2020 dibutuhkan 429 ribu tenaga kerja lulusan SMK dan pada tahun 2035 dibutuhkan 634 ribu tenaga kerja. Kebutuhan tenaga kerja berpendidikan SMK terutama berasal dari sub-sektor industri makanan, industri garmen, serta industri kayu dan pembuatan barang dari kayu. Proyeksi komposisi jumlah kebutuhan tenaga kerja sektor industri jenjang pendidikan SMK per wilayah pada tahun 2035 sebagaimana dijelaskan pada gambar 3 di bawah ini.



Gambar 15. Proyeksi kebutuhan tenaga kerja sektor industri per wilayah (%)

Data diatas menggambarkan proyeksi persentase kebutuhan tenaga kerja dengan tingkat pendidikan SMK (Level 2 KKNI) per wilayah, sebagai contoh untuk wilayah Sumatera pada tahun 2035 diprediksikan akan dibutuhkan sejumlah 81.8% lulusan SMK dari total 100% kebutuhan tenaga kerja saat itu.

Sedangkan jika dilihat dari proyeksi kebutuhan tenaga kerja lulusan SMK berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Lembaga Demografi UI bersama dengan Direktorat SMK diketahui bahwa trend permintaan tenaga kerja berdasarkan sektor ekonomi terus mengalami peningkatan.

Gambar 16. Proyeksi Kebutuhan Tenaga Kerja Lulusan SMK

Sektor	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Pertanian	1,286,853	1,330,705	1,376,313	1,423,757	1,473,126	1,524,512
Pertambangan	156,477	159,131	161,885	164,743	167,712	170,796
Industri	3,303,711	3,455,982	3,615,824	3,783,674	3,960,001	4,145,317
LGAM	151,283	155,481	159,842	164,374	169,084	173,980
Konstruksi	807,057	850,930	897,310	946,346	998,201	1,053,046
Perdagangan, Hotel dan Restoran	4,987,228	5,304,287	5,642,026	6,001,841	6,385,227	6,793,787
Transportasi dan Komunikasi	1,110,329	1,194,464	1,285,134	1,382,857	1,488,194	1,601,752
Lembaga Keuangan, Real Estate, dan Jasa Perusahaan	717,743	769,463	825,027	884,725	948,871	1,017,801
Jasa Kemasyarakatan	1,880,227	1,942,358	2,006,616	2,073,076	2,141,817	2,212,922
Jumlah Tenaga Kerja SMK	14,400,907	15,162,801	15,969,975	16,825,393	17,732,234	18,693,914
Total Tenaga Kerja	126,051,257	128,387,515	130,839,829	133,402,300	136,060,483	138,830,192
Share Tenaga Kerja	11.4	11.8	12.2	12.6	13.0	13.5

Sumber: diolah oleh Lembaga Demografi FEB UI

B. Permasalahan dan Tantangan Pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan Periode 2020-2024

Permasalahan pendidikan kejuruan bisa dikatakan sangatlah kompleks. Sehingga untuk penyelesaiannya tidak bisa dilakukan secara sporadis melainkan harus simultan-komperhensif. Berikut adalah uraian tentang tantangan dan permasalahan yang akan dihadapi oleh pendidikan menengah kejuruan tahun 2020-2024 :

1. Pembiayaan Pendidikan

a. Dependensi terhadap Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Pendanaan pendidikan di Indonesia menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Pemerintah telah memberikan perhatian yang besar dalam hal pendanaan Pendidikan, hal ini dibuktikan dengan alokasi dana pendidikan yang cukup besar sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 49 ayat 1 menyatakan bahwa, “Dana pendidikan termasuk gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.” Dalam implementasi penyelenggaraan pendidikan, tidak semua pendanaan di satuan pendidikan dapat terselesaikan dengan alokasi dana APBN dan APBD. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagai salah satu satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah, membutuhkan sumber dana pendidikan yang dapat mengakomodir seluruh kebutuhan biaya pendidikan (Imam et.al; 2018).

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan secara spesifik mengklasifikasikan pendanaan untuk biaya satuan pendidikan berdasarkan penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan oleh Pemerintah dan Masyarakat. Pendanaan pendidikan untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah menjadi tanggung jawab Pemerintah dan dialokasikan dalam anggaran Pemerintah. Untuk pendanaan tambahannya dapat bersumber dari masyarakat, bantuan pihak asing yang tidak mengikat, dan atau sumber lain yang sah. Pendanaan pendidikan untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi tanggung jawab penyelenggara yang dalam hal ini adalah yayasan pendidikan yang bersangkutan, dan untuk pendanaan tambahannya dapat bersumber dari yayasan, orang tua/wali peserta didik, masyarakat di luar orang tua/wali, bantuan pihak asing yang tidak mengikat, dan atau sumber lain yang sah. Selanjutnya PP Nomor 48 Tahun 2008 pada pasal 3 ayat 2 mengklasifikasikan biaya satuan pendidikan menjadi biaya investasi, biaya operasi, bantuan biaya pendidikan, dan beasiswa. Selanjutnya biaya investasi terdiri atas biaya investasi lahan pendidikan dan biaya investasi selain lahan pendidikan, dan biaya operasi terdiri atas biaya personalia dan biaya nonpersonalia. Gambar berikut adalah gambar skema biaya satuan Pendidikan (Imam et.al; 2018).



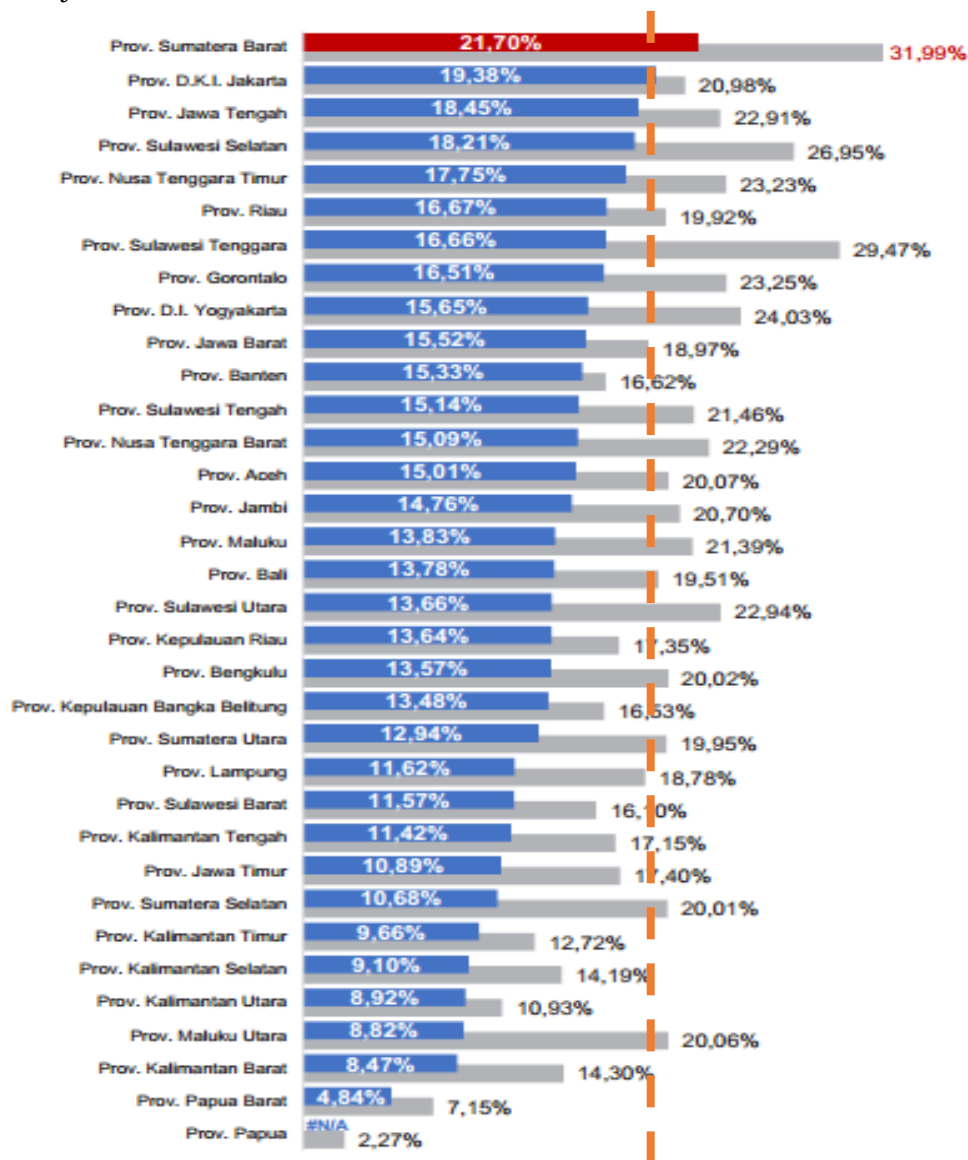
Gambar 17. Skema Biaya Satuan Pendidikan
Sumber: PP No. 48 Tahun 2008

Namun pada faktanya yang terjadi di banyak provinsi di Indonesia sumber pembiayaan pendidikan bertumpu pada kapasitas tunggal yaitu yang berasal dari Pemerintah Pusat melalui dana transfer daerah yang dinamakan Dana Alokasi Khusus Non Fisi yaitu Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

b. Kebijakan dan Alokasi Anggaran Pendidikan di Daerah

Pendanaan pendidikan dari sumber APBN dan APBD mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Besaran dana pendidikan yang memadai menjamin penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Pembagian tanggung jawab dan kewenangan yang jelas antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota akan dapat mengoptimalkan dan mengefisienkan alokasi dana pendidikan. Penggunaan dana pendidikan yang tepat memungkinkan peanglaksanaan dana yang efisien dan adil.

Pada Tahun 2018, pemerintah mengalokasikan dana APBN untuk anggaran pendidikan SMK sebanyak hampir 1.5 Triliun rupiah. Anggaran terbesar diberikan kepada tiga provinsi di pulau Jawa, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tiap provinsi tersebut memperoleh sebesar 298.91 miliar rupiah, 253.82 miliar rupiah dan 241.36 miliar rupiah. Anggaran pendidikan yang tinggi di ketiga provinsi tersebut sesuai dengan jumlah sekolah yang juga tinggi, dimana masing-masing provinsi tersebut memiliki lebih dari 1900 SMK. Lebih dari 3 kali SMK yang tersebar di DKI Jakarta.



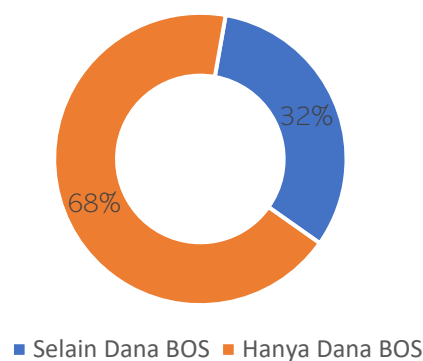
Gambar 18. Neraca Pendidikan Daerah

- Alokasi Anggaran Urusan Pendidikan di Luar Transfer Daerah (APBD Murni)
- Alokasi Anggaran Urusan Pendidikan dengan Transfer Daerah (Minus BOS)

Anggaran pendidikan dari APBD tertinggi dipegang oleh DKI Jakarta, yaitu mencapai 71.164 Miliar rupiah, disusul dengan Jawa barat sebesar 33.96 Miliar Rupiah dan Jawa Timur sebesar 30.76 miliar rupiah. Sementara anggaran Pendidikan yang diambil dari APBD di Provinsi lainnya hanya sekitar 1 hingga 25 Miliar rupiah, dengan anggaran APBD terendah berada di Provinsi Gorontalo dan Sulawesi Barat yang hanya mendapat anggaran APBD kurang dari 2 Miliar rupiah.

Berdasarkan Gambar neraca pendidikan daerah tersebut, terlihat bahwa secara umum anggaran Pendidikan dari APBD tiap provinsi masih belum sesuai dengan yang diamanatkan oleh Pasal 49 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, hanya Sumatera Barat, sebagai satu-satunya provinsi yang telah memberikan anggaran pendidikan lebih dari 20%. Sementara itu, DKI Jakarta, sebagai pemberi APBD tertinggi untuk dana pendidikan, hanya memberikan 19.38 % dana APBD untuk pendidikan. Ironisnya, bahkan masih terdapat provinsi yang mengalokasikan kurang dari 10% APBD-nya untuk pendidikan, seperti pada Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Maluku Utara, Kalimantan Barat, Papua Barat dan Papua. Banyaknya pemerintah daerah yang belum mengalokasikan 20% APBD-nya untuk pendidikan mengindikasikan bahwa pemerintah daerah masih belum seriusan dan belum mengutamakan pendidikan. Hal ini juga mengindikasikan bahwa tingkat *translation ability* pemerintah daerah terhadap pendidikan masih sangat kurang.

Hal lain yang terjadi di daerah adalah adanya politik 'sekolah gratis'. Kebijakan tersebut sangat asimetrikal karena membuat sekolah tidak bisa memungut iuran masyarakat untuk membantu pembiayaan pendidikan sehingga hanya bisa mengandalkan pembiayaan tunggal dari Dana BOS. Berdasarkan data supervisi BOS yang dilakukan oleh Direktorat diketahui bahwa hanya 32% sekolah yang operasional pembiayaannya hanya menggantungkan pada dana BOS dan 68% lainnya ada sumber lain seperti iuran komite dan BOSDA. Namun jika ditelisik lebih mendalam atau dalam konteks proporsionalisasi dan efektifitas sumber pembiayaan 32% ini memiliki signifikansi posisi yang sangat tinggi di sekolah.



Gambar 19. Pembiayaan Pendidikan di Daerah
Sumber: Data Analisis Supervisi BOS 2018

Pada umumnya setiap sumber pembiayaan memiliki segmen penggunaan dana yang berbeda. Kalau DAK Non Fisik (BOS) implementasi dana pada aspek operasional sedangkan Komite dan BOSDA non operasional. Dengan begitu bisa disimpulkan bahwa relasi antar setiap sumber pembiayaan tersebut tidaklah *competing* melainkan *complementing* (saling melengkapi).

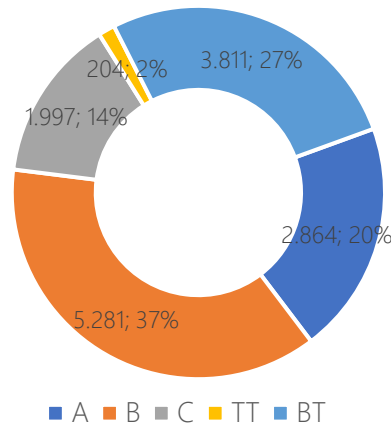
c. Fleksibilitas Pengelolaan Keuangan Sekolah

Problem penting lainnya dalam pendanaan pendidikan adalah adanya aturan dimana dalam proses pembelajaran di sekolah tidak diperbolehkan adanya praktek komersialisasi. Hal tersebut menyebabkan *teaching factory* dan unit produksi yang ada di sekolah hanya berhenti pada menciptakan sebuah produk tanpa ada upaya memunculkan nilai lebih seperti keuntungan yang didapat jika produk tersebut dipasarkan. Aturan dilarangnya komersialisasi unit produksi di sekolah mengandung paradoks, disatu sisi esensi dari pendidikan SMK adalah maksimalisasi dan memunculkan siswa yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang keahliannya yang mana kompetensi tersebut bisa bermakna dan bernilai lebih jika bisa mendapatkan added value baik berupa materi maupun non materi, disisi lain aturan dilarangnya komersialisasi justru menghambat siswa untuk memaksimalkan kompetensi keahliannya.

Problem lain adalah banyak sekolah yang sudah mengaktifkan *teaching factory* dan unit produksi dan telah mendapatkan keuntungan yang besar, oleh karena dalam aturan tidak diperbolehkan mendapatkan keuntungan sehingga yang terjadi adalah keuntungan yang dihasilkan oleh sekolah tersebut harus disetorkan ke Rekening Kas Daerah dan dianggap sebagai pendapatan daerah. Kemudian sebuah ironi muncul yaitu sulitnya sekolah meminta kembali keuntungan yang disetorkannya ke rekening daerah. Hal ini menyebabkan kemandekan dan tidak bisa berkembangnya *teaching factory* di sekolah. Padahal salah satu ciri dari pendidikan kejuruan adalah hal tersebut. Oleh karenanya perlunya suatu payung hukum untuk menaungi hal tersebut agar sekolah bisa mendapatkan tambahan sumber pembiayaan pendidikan lain selain dari pemerintah ataupun masyarakat.

2. Masih rendahnya Mutu Pendidikan SMK

Setelah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang perubahan skema akreditasi yang semula berbasiskan kompetensi keahlian menjadi satuan pendidikan diperoleh data akreditasi sebagai berikut:



Gambar 20. Data Akreditasi SMK
Sumber : BAN SM 2019

Dari data tersebut sebanyak 29% sekolah tidak terakreditasi dan belum terakreditasi. Hal ini menandakan bahwa mutu pendidikan masih rendah dan harus ditingkatkan secara optimal.

3. Tata Kelola Pendidikan Menengah Kejuruan

Paska dikeluarkannya Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mendatangkan berbagai macam implikasi. Salah satunya terhadap Pengelolaan Pendidikan. Sebelum Undang-Undang tersebut lahir, pengelolaan pendidikan Menengah berada dalam wewenang Pemerintah Kabupaten/Kota, setelah disahkan berubah menjadi wewenang Pemerintah Provinsi. Manajemen pengelolaan pendidikan menengah serta penerbitan izin pendidikan menengah merupakan dua urusan yang saat ini menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi. Dalam hal pengelolaan guru, menurut Undang-Undang No. 23 tahun 2014 pemerintah provinsi telah diberikan kewenangan untuk dapat memindahkan guru dan tenaga kependidikan antar daerah kabupaten/kota dalam 1 provinsi. Khusus untuk pengelolaan guru dan tenaga kependidikan jenjang pendidikan menengah juga menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi. Perubahan peranan ini perlu disikapi dengan positif karena pemberian kewenangan yang lebih luas kepada Provinsi sebagai wakil pemerintah pusat memberikan peluang untuk memperbaiki tata kelola Pendidikan Menengah. Dalam Undang-Undang pemerintahan daerah yang lama provinsi hanya memiliki peran yang sangat terbatas dan kurang strategis dalam pengelolaan pendidikan menengah.

The background features a stylized cityscape with various buildings and trees. Overlaid on this are several large, semi-transparent, overlapping semi-circles in shades of orange, pink, green, and blue. A dark grey rectangular box is centered over the circles, containing the text 'BAB II' and 'TUJUAN DAN SASARAN' in white, bold, sans-serif font.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

- A. Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan
- B. Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran

1. VISI-MISI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Sebagai kementerian yang mengemban amanat meningkatkan pembangunan SDM melalui peningkatan mutu layanan pendidikan dan memajukan kebudayaan. Berlandaskan Visi Presiden pada RPJMN Tahun 2020-2024 dan Visi Indonesia 2045 maka kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi memiliki Visi 2020-2024 adalah:

“MEMBANGUN RAKYAT INDONESIA YANG MENJADI PEMBELAJAR SEUMUR HIDUP YANG UNGGUL, TERUS BERKEMBANG, SEJAHTERA, DAN BERAKHLAK MULIA DENGAN MENUMBUHKAN NILAI-NILAI BUDAYA INDONESIA DAN PANCASILA”

Penempatan pembangunan rakyat Indonesia dalam Visi Pendidikan dan Kebudayaan menggarisbawahi pentingnya seluruh rakyat Indonesia sebagai aktor pembangunan bangsa. Mereka adalah sumber daya yang paling utama bagi sebuah negara. Kemampuan suatu bangsa untuk berkompetisi di tengah globalisasi dan inovasi teknologi yang tanpa henti tergantung pada kualitas rakyatnya. Derasnya inovasi teknologi menuntut segenap rakyat Indonesia menjadi pembelajar sepanjang hayat agar mampu menguasai perubahan teknologi tersebut termasuk ilmu pengetahuan sehingga dapat bersaing di tengah-tengah masyarakat global.

Seperti tercantum dalam Visi Pendidikan dan Kebudayaan di atas, pembelajar seumur hidup yang akan dibentuk adalah insan-insan yang memiliki empat karakteristik utama:

(1) Unggul

Unggul di sini merujuk pada pencapaian hasil pembelajaran yang tinggi dan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang mumpuni. Pencapaian tersebut tergambar pada karakter yang dimiliki setiap SDM Indonesia yaitu kreatif, tangguh, percaya diri, mandiri, ingin berkembang, kolaboratif, pemecah masalah, berpikir kritis, dan ingin tahu. Keunggulan lain juga tercermin dalam pencapaian nilai PISA, AKM, AKSI, dan survei karakter, serta kemampuan mendapatkan pekerjaan atau memulai wira usaha selepas dari bangku pendidikan.

(2) Terus berkembang

Terus berkembang bermakna dapat mengembangkan kapasitas diri sebagai pembelajar merdeka (*self-regulated learner*) sepanjang hayat, sehingga tidak mengalami stagnasi keterampilan dan pengetahuan. Rakyat Indonesia adalah sumber daya yang fleksibel dan adaptif terhadap perubahan zaman.

(3) Sejahtera

Sejahtera bermakna rakyat Indonesia yang pembelajar seumur hidup berkontribusi aktif dalam mewujudkan kesejahteraan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkelanjutan kemajuan ekonominya, berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat, dan memiliki ketahanan nasional serta tata kelola pemerintahan yang baik.

(4) Berakhlak mulia

Berakhlak mulia ditunjukkan melalui 5 (lima) nilai karakter utama, yakni religiositas, nasionalisme, integritas, kemandirian dan gotong royong sejalan dengan kebudayaan Indonesia agar bisa beradaptasi dengan lingkungan global yang terus berubah tanpa meninggalkan identitas nasional sebagai bangsa yang berlandaskan Pancasila.

Keempat karakteristik ini terwujud melalui penumbuhkembangan nilai-nilai budaya Indonesia dan Pancasila, yang merupakan fondasi bagi segala arahan pembangunan nasional. Dengan identitas budaya Indonesia dan nilai-nilai Pancasila yang berakar dalam, rakyat Indonesia ke depan akan menjadi masyarakat terbuka yang berkewargaan global - dapat menerima dan memanfaatkan keragaman sumber, pengalaman, serta nilai-nilai dari beragam budaya yang ada di dunia, namun sekaligus tidak kehilangan ciri dan identitas khasnya.

Dalam mewujudkan Visi Pendidikan dan Kebudayaan 2020-2024, Kemendikbud berperan sebagai penyelenggara urusan pemerintahan di bidang pendidikan di seluruh jenjang, serta pengelola kebudayaan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam bidang pendidikan, Kemendikbud akan terus meningkatkan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan pembangunan pendidikan dasar dan menengah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah agar visi pembangunan pendidikan tercapai. Kemendikbud juga melaksanakan pembangunan pendidikan tinggi di seluruh wilayah Indonesia. Agar terwujud rakyat Indonesia yang merupakan pembelajar seumur hidup, layanan pendidikan dasar, menengah, dan tinggi perlu diperluas tanpa pembedaan atas faktor apapun. Satuan pendidikan, keluarga, masyarakat, dan sektor swasta menyukseskan Visi Pendidikan dan Kebudayaan melalui pengembangan potensi peserta didik lewat olah hati, pikir, rasa dan raga yang seimbang demi terwujudnya insan-insan yang berakhlak mulia. Disadari bahwa tercapainya visi yang disebutkan di atas tidak dapat terjadi tanpa komitmen semua pemangku kepentingan pendidikan, baik yang berada dalam pemerintahan maupun masyarakat luas, dalam mengelola dan membiayai pembangunan pendidikan dan kebudayaan.

Dalam hal kebudayaan, Kemendikbud terus memperkuat ketahanan budaya Indonesia dan menggali potensi kebudayaan untuk membangun kesejahteraan bangsa. Dengan berbekal Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Kemendikbud memberikan

kepastian landasan hukum untuk meningkatkan ketahanan budaya bangsa melalui revitalisasi nilai-nilai, tradisi, dan sejarah Indonesia. Dengan demikian, jati diri dan kepercayaan diri bangsa terus kokoh untuk menghadapi masuknya budaya-budaya eksternal. Semakin maraknya industri kreatif berbasis budaya menjadi kesempatan sekaligus tantangan. Berbagai aktivitas kebudayaan melalui sektor industri kreatif dan pariwisata menyokong pembangunan ekonomi, stabilitas sosial, dan kelestarian lingkungan hidup. Sinergi antara kebudayaan dan industri membangun insan-insan Indonesia yang adaptif dalam menghadapi perubahan zaman dan sanggup berinteraksi di tataran lokal maupun global tanpa meninggalkan nilai-nilai tradisional dan kebudayaannya. Di sisi lain, kondisi SDM di bidang kebudayaan, yang adalah komponen pokok bagi pembangunan berkelanjutan, masih perlu diperkuat. Pelestarian berbagai warisan budaya baik yang bersifat bendawi maupun tak bendawi perlu disokong secara holistik integratif, antara lain melalui pengelolaan cagar budaya, pelestarian bahasa daerah, dan peningkatan diplomasi budaya agar lebih dikenal di kancah internasional.

A. Misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Untuk mencapai Visi Pendidikan dan Kebudayaan 2020-2024, ditetapkan 3 (tiga) Misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan pendidikan berkualitas tinggi yang merata dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi.
2. Mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan bahasa dan sastra.
3. Mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan dan kebudayaan.

2. TUJUAN DAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN

Tujuan pendidikan menengah khususnya Sekolah Menengah Kejuruan merupakan derivasi dari tujuan penyelenggaraan pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang termaktub dalam Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020-2024. Tujuan ini juga mendukung dari arahan pembangunan nasional yang tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Dengan demikian tujuan penyelenggaraan pendidikan yang menjadi dasar program kerja Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan selama tahun 2020-2024 yaitu sebagai berikut:

No.	Tujuan
1.	Perluasan akses pendidikan bagi peserta didik SMK yang berkeadilan dan inklusif

2.	Penguatan mutu dan relevansi pendidikan yang berpusat pada perkembangan peserta didik SMK
3.	Pengembangan potensi peserta didik yang berkarakter
4.	Penguatan sistem tata kelola pendidikan SMK yang partisipatif, transparan, dan akuntabel

Tabel 1. Tujuan Penyelenggaraan Pendidikan SMK

3. SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA SASARAN

Dalam rangka mengukur tingkat ketercapaian tujuan pembangunan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan, diperlukan sejumlah sasaran kinerja (SS) yang ingin dicapai dan akan dilaksanakan selama periode Rencana Strategis Direktorat SMK 2020-2024:

1. Sasaran yang ingin dicapai pada tujuan Meningkatkan Pemerataan Akses Layanan Pendidikan SMK adalah sebagai berikut :
 - Meningkatkan Pemenuhan sarana dan prasarana SMK yang menunjang peningkatan kualitas pembelajaran.
 - Meningkatkan Peningkatan Daya Tampung SMK
2. Sasaran yang ingin dicapai pada tujuan Meningkatkan kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan SMK adalah sebagai berikut :
 - Meningkatkan Penyesuaian Kurikulum dengan IDUKA
 - Meningkatkan Pengembangan *teaching factory* di SMK
 - Terlaksananya Peraturan Pendidikan tentang Program SMK-Diploma II *Fasttrack*
 - Meningkatkan pelaksanaan Pengembangan Pembelajaran Digital
 - Meningkatkan *Link and Match* Industri
 - Meningkatkan dan bertambahnya Magang Guru dan Guru Tamu dari IDUKA
 - Terbentuknya platform untuk Pemasaran Lulusan melalui Pusat Karir
 - Meningkatkan Sertifikasi Kompetensi Siswa SMK
 - Mengembangkan Pendidikan Produk Kreatif dan Kewirausahaan
 - Meningkatkan Pembinaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
3. Sasaran yang ingin dicapai pada tujuan Menguatnya karakter peserta didik adalah sebagai berikut :
 - Penguatan Budaya Kerja untuk peserta Didik SMK
 - Akselerasi Praktik Kerja Industri yang Berkualitas
4. Sasaran yang ingin dicapai pada tujuan: Meningkatkan tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel adalah sebagai berikut :
 - Meningkatkan Pembinaan SMK menjadi BLUD

- Meningkatnya Penerapan Sistem Manajemen Mutu Tata Kelola SMK
- Meningkatnya Kerjasama antar Lembaga dan Pemerintah Daerah
- Meningkatnya Koordinasi dengan Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi untuk Pembinaan Guru Kejuruan SMK

4. TATA NILAI

Pelaksanaan misi dan pencapaian visi memerlukan penerapan tata nilai yang sesuai dan mendukung. Tata nilai merupakan dasar sekaligus arah bagi sikap dan perilaku seluruh pegawai Kemendikbud dalam menjalankan tugas membangun pendidikan dan kebudayaan. Tata nilai yang diutamakan pada Renstra 2020-2024 ini adalah sebagai berikut:

1. Integritas

Pada nilai integritas terkandung makna keselarasan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Sesuai dengan nilai integritas, pegawai Kemendikbud diharapkan konsisten dan teguh dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan, terutama dalam hal kejujuran dan kebenaran dalam tindakan dan mengemban kepercayaan. Adapun indikator yang mencerminkan nilai integritas adalah:

- Konsisten dan teguh dalam menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dalam tindakan b. Jujur dalam segala tindakan
- Menghindari benturan kepentingan
- Berpikiran positif, arif, dan bijaksana dalam melaksanakan tugas dan fungsi
- Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Tidak melakukan tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme
- Tidak melanggar sumpah dan janji pegawai/jabatan
- Tidak melakukan perbuatan rekayasa atau manipulasi
- Tidak menerima pemberian (gratifikasi) dalam bentuk apapun di luar ketentuan

2. Kreatif dan Inovatif

Nilai kreatif dan inovatif bermakna memiliki daya cipta, kemampuan untuk menciptakan hal baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya. Hal baru tersebut dapat berupa gagasan, metode, atau alat. Indikator dari nilai kreatif dan inovatif adalah:

- Memiliki pola pikir, cara pandang, dan pendekatan yang variatif terhadap setiap permasalahan, serta mampu menghasilkan karya baru
- Selalu melakukan penyempurnaan dan perbaikan berkala dan berkelanjutan
- Bersikap terbuka dalam menerima ide-ide baru yang konstruktif
- Berani mengambil terobosan dan solusi dalam memecahkan masalah

- e. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam bekerja secara efektif dan efisien
- f. Tidak merasa cepat puas dengan hasil yang dicapai
- g. Tidak bersikap tertutup terhadap ide-ide pengembangan
- h. Tidak monoton

3. Inisiatif

Inisiatif adalah kemampuan bertindak melebihi yang dibutuhkan atau yang dituntut dari pekerjaan. Pegawai Kemendikbud sewajarnya melakukan sesuatu tanpa menunggu perintah lebih dahulu dengan tujuan untuk memperbaiki atau meningkatkan hasil pekerjaan, dan menciptakan peluang baru atau menghindari timbulnya masalah. Indikator dari nilai inisiatif adalah:

- a. Responsif melayani kebutuhan stakeholder
- b. Bersikap proaktif terhadap kebutuhan organisasi
- c. Memiliki dorongan untuk mengidentifikasi masalah atau peluang dan mampu mengambil tindakan nyata untuk menyelesaikan masalah
- d. Tidak hanya mengerjakan tugas yang diminta oleh atasan
- e. Tidak sekedar mencari suara terbanyak, berlindung dari kegagalan, berargumentasi bahwa apa yang Anda lakukan telah disetujui oleh semua anggota tim

4. Pembelajar

Pada nilai pembelajar terkandung ikhtiar untuk selalu berusaha mengembangkan kompetensi dan profesionalisme. Pegawai Kemendikbud harus berkeinginan dan berusaha untuk selalu menambah dan memperluas wawasan, pengetahuan, dan pengalaman, serta mampu mengambil hikmah dan pelajaran atas setiap kejadian. Indikator yang menunjukkan nilai pembelajar adalah:

- a. Berkeinginan dan berusaha untuk selalu menambah dan memperluas wawasan, pengetahuan, dan pengalaman
- b. Mengambil hikmah dari setiap kesalahan dan menjadikannya pelajaran
- c. Berbagi pengetahuan/pengalaman dengan rekan kerja
- d. Memanfaatkan waktu dengan baik
- e. Suka mempelajari hal yang baru
- f. Rajin belajar/bertanya/berdiskusi

5. Menjunjung Meritokrasi

Nilai menjunjung meritokrasi berarti menjunjung tinggi keadilan dalam pemberian penghargaan bagi karyawan yang kompeten. Pegawai Kemendikbud perlu memiliki pandangan yang memberi peluang kepada orang untuk maju berdasarkan kelayakan dan kecakapannya. Indikator yang mencerminkan nilai ini adalah:

- a. Berkompetisi secara profesional
- b. Memberikan kesempatan yang setara dalam mengembangkan kompetensi pegawai
- c. Memberikan penghargaan dan hukuman secara proporsional sesuai kinerja
- d. Tidak sewenang-wenang
- e. Tidak mementingkan diri sendiri
- f. Menduduki jabatan sesuai dengan kompetensinya
- g. Mendapatkan promosi bukan karena kedekatan/primordialisme

6. Terlibat Aktif

Nilai terlibat aktif bermakna senantiasa berpartisipasi dalam setiap kegiatan. Pegawai Kemendikbud semestinya suka berusaha mencapai tujuan bersama serta memberikan dorongan, agar pihak lain tergerak untuk menghasilkan karya terbaiknya. Nilai terlibat aktif terlihat dari indikator:

- a. Terlibat langsung dalam setiap kegiatan untuk mendukung visi dan misi Kementerian
- b. Memberikan dukungan kepada rekan kerja
- c. Peduli dengan aktifitas lingkungan sekitar (tidak apatis)
- d. Tidak bersifat pasif, sekedar menunggu perintah

7. Tanpa Pamrih

Nilai tanpa pamrih memiliki arti bekerja dengan tulus ikhlas dan penuh dedikasi. Pegawai Kemendikbud, yang memiliki nilai tanpa pamrih, tidak memiliki maksud yang tersembunyi untuk memenuhi keinginan dan memperoleh keuntungan pribadi. Sebaliknya pegawai Kemendikbud memberikan inspirasi, dorongan, dan semangat bagi pihak lain untuk suka berusaha menghasilkan karya terbaiknya sesuai dengan tujuan bersama. Indikator nilai tanpa pamrih adalah:

- a. Penuh komitmen dalam melaksanakan pekerjaan
- b. Rela membantu pekerjaan rekan kerja lainnya
- c. Menunjukkan perilaku 4S (senyum, sapa, sopan, dan santun)
- d. Tidak melakukan pekerjaan dengan terpaksa
- e. Tidak berburuk sangka kepada rekan kerja

Peningkatan internalisasi ketujuh nilai di atas di antara pegawai Kemendikbud semakin dirasakan urgensinya untuk memastikan pembangunan pendidikan dan kebudayaan sesuai dengan Visi Pendidikan dan Kebudayaan 2020-2024 didukung oleh kinerja Kemendikbud yang prima.



BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI

KERANGKA REGULASI DAN KEBIJAKAN

BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI KERANGKA REGULASI DAN KEBIJAKAN

- A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN NASIONAL
- B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN SMK
- C. KERANGKA REGULASI
- D. KERANGKA KEBIJAKAN

1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN PENDIDIKAN NASIONAL

Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Nasional merujuk pada Visi pembangunan nasional tahun 2020-2024 dalam RPJMN IV adalah:

“Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong”

Visi tersebut dijalankan dalam 9 (sembilan) misi yang dikenal sebagai Nawa Cita Kedua. Nawa Cita dalam periode 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya;
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

RPJMN IV memberikan penjelasan lebih lanjut tentang lima arahan utama Presiden sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawa Cita, termasuk di antaranya arahan tentang pembangunan SDM:

Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerja sama industri dan talenta global.”

Sesuai dengan RPJMN IV, arahan presiden yang berkenaan dengan pembangunan SDM dilaksanakan dalam dua agenda pembangunan: (1) meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing, dan (2) revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.

Berdasarkan arah pembangunan nasional tersebut, maka Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menderivasikannya ke dalam arah kebijakan dan strategi pembangunan sektor pendidikan yang tentunya menjadi bagian pula dalam pembangunan nasional. Terdapat dua agenda pembangunan yang berkaitan erat dengan tugas dan fungsi Kemendikbud. Kedua agenda tersebut dilaksanakan melalui arahan kebijakan dan strategi bidang pendidikan dan kebudayaan, seperti yang dirangkum dalam tabel berikut:

No	Agenda Pembangunan	Arahan Kebijakan	Strategi
1	Meningkatkan SDM yang	Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas	1. Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran;

No	Agenda Pembangunan	Arahan Kebijakan	Strategi
	berkualitas dan berdaya saing		<ol style="list-style-type: none"> 2. Peningkatan pemerataan akses layanan pendidikan di semua jenjang dan percepatan pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun; 3. Peningkatan profesionalisme, kualitas, pengelolaan, dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan yang merata; 4. Penguatan penjaminan mutu pendidikan untuk meningkatkan pemerataan kualitas layanan antarsatuan pendidikan dan antarwilayah; 5. Peningkatan tata kelola pembangunan pendidikan, strategi pembiayaan, dan peningkatan efektivitas pemanfaatan Anggaran Pendidikan;
		Meningkatkan produktivitas dan daya saing	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerjasama industri; dan 2. Penguatan pendidikan tinggi berkualitas.
2	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memperkuat ketahanan budaya bangsa dan membentuk mentalitas bangsa yang maju, modern, dan berkarakter	<ol style="list-style-type: none"> 1. Revolusi mental dalam sistem pendidikan untuk memperkuat nilai integritas, etos kerja, gotong royong, dan budi pekerti; 2. Revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan untuk penguatan budaya birokrasi yang bersih, melayani, dan responsif; 3. Pembinaan ideologi Pancasila, pendidikan kewargaan, wawasan kebangsaan, dan bela negara untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme 4. Pengembangan diplomasi budaya untuk memperkuat pengaruh Indonesia dalam perkembangan peradaban dunia; dan 5. Pengembangan tata kelola 6. Pembangunan kebudayaan
		Peningkatan literasi, inovasi, dan kreativitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan budaya literasi;

No	Agenda Pembangunan	Arahan Kebijakan	Strategi
			2. Pengembangan, pembinaan, dan perlindungan Bahasa Indonesia, bahasa dan aksara daerah, serta sastra; dan 3. Penguatan institusi sosial penggerak literasi dan inovasi
		Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan untuk memperkuat karakter dan memperteguh jati diri bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia	1. Revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal untuk menumbuhkan semangat kekeluargaan, musyawarah, gotong-royong, dan kerja sama antarwarga; 2. Pengembangan dan pemanfaatan kekayaan budaya untuk memperkuat karakter bangsa dan kesejahteraan rakyat; 3. Pelindungan hak kebudayaan dan ekspresi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif;

2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN SMK

Arah kebijakan dan strategi pengembangan SMK 2020-2024 mengikuti kebijakan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi yaitu *“Link and Match”* SMK dengan IDUKA. Dalam kebijakan *Link and Match* ini ada beberapa paket program pendukung yaitu sebagai berikut:

- 1) Penyelarasan Kurikulum dengan IDUKA,
- 2) Guru Tamu dari IDUKA,
- 3) Praktek Kerja Industri bagi Siswa,
- 4) Pemasaran Lulusan
- 5) Sertifikasi Kompetensi bagi lulusan,
- 6) Magang Guru,
- 7) Bantuan Peralatan ke Sekolah
- 8) Bantuan Bangunan Fasilitas Sekolah
- 9) Budaya Kerja

Kodifikasi terhadap program tersebut merupakan tujuan pokok dari beberapa hal yang dimasukan dalam orientasi dari pendidikan itu sendiri. Ada 2 macam tujuan yang pada umumnya adalah pokok dalam penyelenggaraan pendidikan yaitu peningkatan mutu dan akses. Peningkatan mutu yang ingin dicapai oleh Direktorat SMK yaitu Peningkatan mutu dan relevansi pembelajaran yang berorientasi pada penyelarasan terhadap Dunia Usaha dan Dunia Industri dan Peningkatan

Kualitas SDM SMK untuk menghadapi Pasar Kerja, sedangkan akses pendidikan yang ingin diraih adalah Peningkatan akses pendidikan kejuruan yang berkualitas dan berkelanjutan.

Untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas pada Sekolah Menengah Kejuruan tidak cukup hanya fokus pada akses dan mutu tetapi juga perlu koordinasi multistakeholder pengelola pendidikan. Oleh karena itu upaya untuk mewujudkan tata kelola pendidikan yang integratif merupakan sebuah keharusan untuk mendorong terwujudnya tujuan pendidikan yang berkualitas. Selain itu pula intervensi kebijakan penuntasan yang dilakukan oleh Direktorat SMK mengcover semua komponen program yang ada di paket kebijakan *Link and Match*. Dengan begitu, kodifikasi antara pencapaian tujuan pendidikan dengan paket program Link and Match adalah sebagai berikut:

No	Paket Program	Kodifikasi Tujuan
1	Penyelarasan Kurikulum dengan IDUKA	Peningkatan mutu dan relevansi pembelajaran yang berorientasi pada penyelarasan terhadap Dunia Usaha dan Dunia Industri dan Peningkatan Kualitas SDM SMK untuk menghadapi Pasar Kerja
2	Guru Tamu dari IDUKA	
3	Praktek Kerja Industri bagi Siswa	
4	Pemasaran Lulusan	
5	Sertifikasi Kompetensi bagi lulusan	
6	Magang Guru	
7	Budaya Kerja	
8	Bantuan Peralatan ke Sekolah	Peningkatan akses pendidikan kejuruan yang berkualitas dan berkelanjutan
9	Bantuan Bangunan Fasilitas Sekolah	

Tabel 3. Kodifikasi Tujuan Strategis Terhadap Paket Program

Dengan begitu, terdapat 4 kodifikasi tujuan sebagai berikut:

- Peningkatan mutu dan relevansi pembelajaran yang berorientasi pada penyelarasan terhadap Dunia Usaha dan Dunia Industri dan Peningkatan Kualitas SDM SMK untuk menghadapi Pasar Kerja
- Peningkatan akses pendidikan kejuruan yang berkualitas dan berkelanjutan
- Pengembangan SMK Menjadi Pusat Keunggulan (Center of Excellence)
- Peningkatan Tata Kelola Integratif SMK

Ke empat kodifikasi tujuan ini merupakan representasi dari kebijakan Direktorat SMK untuk mendukung kebijakan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. Penjelasan detail mengenai program tersebut yaitu sebagai berikut:

A. Peningkatan mutu dan relevansi pembelajaran yang berorientasi pada penyelarasan terhadap Dunia Usaha dan Dunia Industri dan Peningkatan Kualitas SDM SMK untuk menghadapi Pasar Kerja

Arah kebijakan yang diterapkan dalam melaksanakan tujuan strategis ini melalui:

a) Penyelarasan Kurikulum dengan IDUKA

Program penyelarasan kurikulum dengan IDUKA ini didukung oleh beberapa program kerja sebagai berikut:

a. *Pengembangan teaching factory di SMK*

Teaching Factory (TEFA) adalah Model pembelajaran berbasis industri (produk dan jasa) melalui sinergi sekolah dengan DU/DI untuk menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai dengan kebutuhan pasar. Model pembelajaran berbasis industri berarti bahwa setiap produk praktik yang dihasilkan adalah sesuatu yang berguna dan bernilai ekonomi atau memiliki daya jual dan diterima oleh pasar.

Adapun strategi pengembangan Teaching Factory adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan kebijakan implementasi Teaching Factory di SMK
2. Teaching Factory menjadi model utama jati diri SMK yang bersinergi dengan DUDI.
3. Menetapkan standar dan penjaminan mutu implementasi teaching factory agar bisa berjalan di seluruh SMK.
4. Teaching Factory di SMK sebagai “Maker Space” untuk pencapaian kompetensi dan menumbuhkan inovasi produk bagi siswa
5. Mendorong pemerintah daerah melalui dinas Pendidikan untuk mengembangkan tata kelola BLUD di SMK
6. Penyiapan infrastruktur untuk mendukung kreasi, produksi dan pemasaran produk SMK
7. Teaching Factory menjadi model dan strategi pengembangan inkubator kewirausahaan sebagai bagian ekosistem pengembangan kewirausahaan di SMK

b. *Program SMK-Diploma II Fasttrack*

Strategi untuk melaksanakan kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Uji sertifikasi sesuai dengan SKKNI setara level 3 dan 4
2. Proporsi belajar SMK SMK-D2 fasttrack: 2,5 tahun di institusi SMK, 1 tahun di DUDI, 0,5 tahun di politeknik sehingga 8 semester
3. Pada program SMK-D2 Fasttrack, ketika lulus SMK adalah menguasai ketrampilan dasar dan uji sertifikasi kompetensi level SMK. setelah 1 tahun di DUDI outputnya mengembangkan 1 semester di politeknik dengan melakukan project based learning.
4. Lulusan SMK-D2 Fasttrack jika melanjutkan ke politeknik, dapat lanjut ke D4 dengan menempuh 2 tahun pendidikan. (pendidikan berkelanjutan)

c. *Pengembangan Pembelajaran Digital*

Strategi untuk melaksanakan pengembangan pembelajaran digital adalah sebagai berikut:

1. Memfasilitasi pemanfaatan berbagai platform pembelajaran dalam jaringan
2. Memfasilitasi pengembangan konten pembelajaran dalam jaringan
3. Melakukan Upskilling dan Reskilling Guru dalam pembelajaran dalam jaringan
4. Mengembangkan sistem penjaminan mutu pembelajaran dalam jaringan

5. Memfasilitasi infrastruktur implementasi pembelajaran dalam jaringan

d. Link and Match Industri

Strategi yang dilakukan untuk mendorong perkawinan masal dengan Industri antara sekolah dan Industri adalah sebagai berikut:

1. Mendorong keterlibatan industri dengan mendorong stakeholder terkait untuk membangun skema regulasi khusus untuk insentif Industri
2. Pendefinisian sampai pada level operasional penjabaran deduction tax agar bisa diterapkan industri
3. Bekerjasama dengan Direktorat Mitras DUDI untuk kerja sama dalam mengakselerasi kerja sama dengan dunia usaha dan industri

b) Magang Guru dan Guru Tamu dari IDUKA

Magang guru dapat meningkatkan relevansi kompetensi keahlian guru produktif dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada di dunia usaha dan dunia industri.

Magang guru dilaksanakan dengan menggunakan strategi di:

1. Bekerja sama dengan Direktorat Mitras dan Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi untuk membuat pola magang dan guru tamu serta pelatihan peningkatan kompetensi guru kejuruan.
2. Membuat roadmap pengembangan magang dan skema guru tamu untuk Sekolah Menengah Kejuruan bersama dengan Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi dan Direktorat Mitras

c) Praktik Kerja Industri

Praktik Kerja Lapangan yang selanjutnya disingkat PKL adalah pembelajaran bagi peserta didik yang dilaksanakan di Dunia Kerja untuk meningkatkan kompetensi peserta didik. Untuk peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia, perlu diterapkan penguatan dan ditingkatkan peningkatan kompetensi peserta didik melalui pembelajaran di luar satuan pendidikan dalam bentuk praktik kerja lapangan dan/atau magang. Adapun tujuan dari praktik kerja Industri ini adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan karakter dan budaya kerja yang profesional kepada peserta didik;
2. Menkuatkan dan meningkatkan kompetensi peserta didik melalui pembelajaran atau pelatihan pada Dunia Kerja; dan menyiapkan kemandirian peserta didik untuk bekerja dan/atau berwirausaha.

d) Pemasaran Lulusan

Pemasaran lulusan dilaksanakan dengan mengembangkan pusat karir SMK yang memiliki manfaat sebagaimana berikut:

1. Memfasilitasi pencari kerja lulusan SMK untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan bakat, minat dan ketrampilannya.

2. Membantu perusahaan pengguna tenaga kerja SMK untuk mendapatkan tenaga kerja yang berkualitas, terampil dan profesional sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
3. Sebagai sarana promosi SMK untuk bekerja sama dengan DU/DI.
4. Melaksanakan rekrutmen tenaga kerja melalui bursa kerja luring dan daring.
5. Memberikan bimbingan karir yang berkelanjutan bagi tenaga kerja SMK.
6. Mengurangi angka pengangguran melalui peningkatan penempatan tenaga kerja SMK

Strategi yang dilakukan untuk melakukan pemasaran terhadap lulusan SMK adalah dengan membuat platform terintegrasi antara *supply* dan *demand*.

e) Sertifikasi Kompetensi Siswa SMK

Sertifikasi Kompetensi Siswa SMK, Siswa SMK yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bahasa Asing,, Siswa SMK yang Mendapatkan Re-tooling Pelatihan Kerja dan mengakselerasi pendirian LSP untuk SMK. Strategi sertifikasi ini sangat penting dilakukan sebagai representasi dari keahlian peserta didik SMK.



Gambar 21. Jenis Sertifikasi profesi

f) Pembekalan Budaya Kerja Siswa SMK

Strategi untuk melaksanakan dan mengimplementasikan budaya kerja adalah sebagai berikut:

1. Budaya kerja sifatnya soft skill, perlu dilatih secara terus menerus. Untuk menciptakan budaya perlu kebiasaan, untuk membentuk kebiasaan perlu perilaku, untuk menciptakan perilaku perlu niat, untuk menciptakan niat perlu organisasi yang selanjutnya dituangkan dalam regulasi dan keteladanan.
2. Budaya K3 Budaya cek dan recheck itu bagian dari budaya kerja. sehingga budaya kerja perlu keteladanan.
3. Mengembangkan iklim kerja di sekolah sama dengan di DUDI

g) Pembinaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

Pembinaan ini dilakukan untuk memberikan otonomi pengelolaan sekolah berdasarkan potensi yang ada di sekolah tersebut. MBS ini didukung melalui piranti pengelolaan tata kelola

administrasi yang mengikuti perkembangan teknologi dengan pemanfaatan sumber-sumber berbasis online.

h) **Mengembangkan Pendidikan Produk Kreatif dan Kewirausahaan**

Meningkatkan kualitas pembelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan dengan mendorong tumbuhnya *Start-Up* dengan dukungan *digital skills* untuk menangkap peluang potensi digital ekonomi melalui pengalaman langsung, pengalaman nyata, dan pekerjaan berbasis proyek dengan pengembangan kompetensi kewirausahaan dimulai dari intitusi pendidikan di realisasikan dalam kehidupan masyarakat dan dunia bisnis secara nyata. Mendirikan usaha meliputi beberapa fungsi kunci menentukan produk/jasa, merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana, pengadaan sarana dan parasarana, pengadaan tenaga kerja dan pemenuhan izin usaha. Menjalankan organisasi usaha meliputi beberapa fungsi kunci mengelola tenaga kerja, membuat rencana produksi, menentukan bahan baku, penyediaan bahan baku, melaksanakan produksi, mengelola produk, memasarkan produk, interaksi dengan konsumen dan mengelola keuangan.

Munculnya industri 4.0 yang ditandai dengan pergerakan sektor industri jasa yang masif memberikan peluang perekonomian baru. Data makro ekonomi pun menunjukkan hal yang sama. Salah satunya muncul berbagai macam platform marketplace yang memudahkan pertemuan *supply* dan *demand* barang. Kondisi inilah yang kemudian direspon oleh Direktorat SMK untuk akselerasi program Kewirausahaan digital untuk memberikan bekal kepada lulusan SMK yang memiliki intensi lebih dalam bidang ini. Intervensi yang dilakukan Direktorat sampai dengan tahun 2024 dengan mengembangkan tumbuhnya ekosistem kewirausahaan di SMK meliputi:

1. Kebijakan

Sinergi kebijakan Direktorat SMK, pemerintah daerah dan manajemen sekolah dalam mendukung kegiatan pengembangan kurikulum dan implementasi aktifitas kewirausahaan di SMK. Seperti berbagai aturan yang mendukung, interaksi dan kolaborasi dengan UMKM di luar sekolah, investor, mentor dari pengusaha dan lainnya

2. Keuangan

Dukungan akses permodalan melalui program hibah, akses ke investor atau bank

3. Budaya

Pengembangan motivasi, cerita sukses, budaya inovasi dan kreatifitas, kompetensi kewirausahaan, bangkit dari kegagalan, berorientasi kesuksesan, bekerja keras untuk memenuhi target dan lainnya

4. Dukungan fasilitasi

Dukungan fasilitasi dalam berkreasi, berproduksi, pemasaran dan layanan konsumen serta kelanjutan usaha baik dari aspek legalitas, finansial maupun pendampingan usaha dengan kerjasama denga dunia usaha dan industri.

5. Sumber daya Manusia

Ketersediaan guru yang bersertifikasi pendamping kewirausahaan, mentor/pendamping dari industri, potensi internal dan eksternal siswa, jejaring komunitas dan kepemimpinan.

6. Pasar

Untuk mendorong kegiatan kewirausahaan dengan memfasilitasi pameran Hasil Karya Peserta Didik dan StartUp Bisnis. Pameran ini berfungsi sebagai stimulus munculnya lulusan SMK yang siap membuka usaha sendiri tanpa ketergantungan dengan ketersediaan lapangan kerja. Menciptakan akses pasar yang kondusif seperti mendatangkan/kunjungan konsumen, distribusi barang, *marketplace*, dan jejaring digital, kerjasama industri, akses pasar ekspor maupun dalam negeri.

B. Peningkatan akses pendidikan kejuruan

Arah kebijakan yang diterapkan dalam melaksanakan tujuan strategis ini melalui:

a) *Pemenuhan sarana dan prasarana SMK yang menunjang peningkatan kualitas pembelajaran.*

Pemenuhan sarana prasarana ini bertujuan untuk menunjang infrastruktur pembelajaran di sekolah. Dengan infrastruktur yang memadai dan mencukupi kebutuhan, harapannya dapat meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah.

Strategi untuk pemenuhan kebutuhan sarana prasarana adalah sebagai berikut:

1. Pemenuhan sarana prasarana berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, UKM, dan DUDI.
2. Mendorong sekolah untuk bisa mandiri dalam memenuhi sarana prasarana melalui program kewirausahaan/Teaching Factory yang ada di sekolah.
3. Dalam pemenuhan sarana prasarana SMK, perlu pemetaan kebutuhan sarana prasarana sampai dengan tahun 2024 untuk setiap SMK.
4. Segregasi segmentasi pembiayaan peralatan melalui kombinasi APBN dengan Dana Transfer

b) *Peningkatan Daya Tampung SMK*

Saat Ini SMK dijadikan sebagai salah satu strategi pemerintah dalam peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan guna meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, serta mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Oleh karenanya keberadaan SMK yang dibangun pada kawasan 3T dan kawasan pertumbuhan ekonomi antara lain kawasan industri, kawasan ekonomi khusus, kawasan destinasi prioritas pariwisata dan kawasan pertanian/kemaritiman menjadikan sangat penting. Oleh karena pembangunan unit sekolah baru (USB) dinilai perlu untuk segera dilakukan mengingat kapasitas SMK saat ini hanya dapat menampung

78.94% pendaftar. Strategi yang dapat diterapkan agar peningkatan daya tampung SMK memperoleh hasil maksimal yakni:

1. Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB). Unit Sekolah Baru diprioritaskan untuk membangun SMK di kecamatan yang belum memiliki SMK yang dapat diberikan untuk pendirian SMK Negeri maupun Swasta. Dana digunakan untuk pembangunan gedung pembelajaran (ruang teori, ruang praktik dan ruang penunjang beserta selasarnya), pengadaan peralatan praktik siswa, pembangunan kamar mandi/WC, pengadaan perabot ruang pembelajaran (ruang teori dan ruang praktik), biaya perencanaan, pengawasan pembangunan, pengelolaan administrasi dan biaya pengadaan guru.
2. Pembangunan USB hendaknya mengacu pada 8 standar nasional pendidikan yang telah ditetapkan serta pada petunjuk teknis yang telah dikeluarkan oleh direktorat SMK.
3. Kompetensi keahlian yang akan dibangun pada USB merupakan kompetensi keahlian yang sesuai dengan potensi daerah dan disesuaikan dengan kebutuhan industri, dunia usaha, dan dunia kerja.
4. Afirmasi khusus Pada Daerah 3T. Bantuan ini ditujukan untuk meningkatkan kapasitas SMK yang berada di berada di Provinsi Papua dan Papua Barat, berada di Daerah Khusus, dan berada di Daerah yang tergolong Tertinggal, Terluar, Terdepan (3T). Selain itu dikembangkan pula Sekolah Garis Depan (SGD) pada daerah terluar Indonesia.
 - Perlu adanya pemerataan pada ketersediaan calon tenaga kerja di daerah 3T yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan daerahnya.

3. Pengembangan SMK menjadi Pusat Keunggulan (*Center Of Excellence*)

SMK sebagai Pusat Keunggulan (*Center Of Excellence*) merupakan SMK yang mempunyai kinerja sangat baik (*excellent*), sehingga berfungsi sebagai penggerak untuk menginspirasi dan memfasilitasi peningkatan kinerja dan mutu sekolah lainnya serta memberikan layanan produk/jasa secara profesional kepada masyarakat. SMK yang memiliki keunggulan-keunggulan, diantaranya unggul dalam hal sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia (SDM), guru yang bersertifikasi, dan guru yang memiliki pengalaman industri.
2. Modernisasi sarana dan prasarana SMK.
3. Lulusan-lulusan yang tersertifikasi industri dan keterserapan dalam dunia kerja.
4. Mampu membuat produk sendiri dengan capaian produk unggulan, tersertifikasi HAKI, dan produk laku terjual.
5. Berprestasi, baik prestasi guru maupun siswa dalam lomba tingkat lokal, nasional, dan internasional.
6. Pengembangan *interpreneurship* dengan indikator yaitu: tumbuhnya startup bisnis kelompok usaha di sekolah, capaian omset, dan inkubator wirausaha.

7. Kerjasama dengan industri, misalnya mendatangkan guru tamu dari industri, melakukan sharing terkait sumber daya, melakukan pengembangan kurikulum yang fleksibel sesuai dengan kebutuhan industri, dan mengadakan magang dengan industri.
8. Tata kelola menuju Smart School dan mengimplementasikan BLUD
9. Implementasi pembelajaran di era Industri 4.0
10. Pengembangan Digital Skill dalam pembelajaran, seperti coding dan bisnis digital.
11. SMK yang menjadi penggerak bagi pengembangan potensi wilayahnya dan potensi kerja global
12. Pengembangan Budaya industri yang tercermin dalam budaya sekolah.

Dengan dikembangkannya COE (*Center Of Excellence*) pada sekolah SMK, diharapkan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penurunan daya saing dapat diminimalisir sebanyak mungkin. Untuk meningkatkan daya saing sekolah SMK melalui pengembangan COE perlu diperhatikan prioritas dari sektor COE, yaitu:

1. Mempertimbangkan potensi pengembangan wilayah
2. Mempertimbangkan proyeksi keterserapan tenaga kerja di masa depan
3. Penentuan sektor COE selaras dengan Making Indonesia 4.0

Peningkatan kualitas SMK diperlukan untuk menghasilkan tenaga-tenaga trampil yang berkarakter kuat memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja. SMK berperan penting dalam menyiapkan generasi muda untuk mengembangkan potensi dirinya sepanjang hayat sehingga mampu bekerja dan berwirausaha. Berdasarkan Renstra Kemendikbud tahun 2020-2024, Strategi yang dilakukan Kemendikbud dalam rangka percepatan pemerataan kualitas layanan pendidikan adalah:

1. meningkatkan pemerataan layanan pendidikan yang berkualitas;
2. memungkinkan pemanfaatan sumber daya pendidikan secara bersama antar satuan pendidikan dalam satu daerah (termasuk pendidik dan fasilitas lainnya);
3. merancang intervensi yang memperhitungkan situasi di setiap daerah dan setiap satuan pendidikan;
4. mempertimbangkan mekanisme intervensi dan pembiayaan berbasis kinerja;
5. memastikan seluruh pemangku kepentingan memegang peran sesuai kewenangan; dan
6. memadukan seluruh sumber daya dari pusat, daerah, satuan pendidikan dan masyarakat dalam melakukan intervensi di setiap daerah.

Pengembangan *Center of Excellence* di SMK diperlukan sebagai standarisasi sumber daya, model bisnis, indikator kinerja dan pengukurannya, serta tata kelolanya sehingga menunjukkan keunggulan yang dapat diakses dan dimanfaatkan oleh lulusan dunia usaha dan industri. Sekolah yang pernah masuk dalam kategori Rujukan, Unggulan dan Revitalisasi merupakan sekolah dalam kategori yang sudah baik yang harapan kedepannya, sekolah tersebut dapat turut serta membina sekolah-sekolah lain di sekitarnya untuk berkembang juga menjadi sekolah unggulan, termasuk juga SMK yang akan masuk menjadi SMK sebagai pusat keunggulan

(*Center of Excellence*). Sasaran SMK yang menjadi pusat keunggulan akan diambil dari SMK yang belum pernah diintervensi menjadi SMK Rujukan, Unggulan dan Revitalisasi.

Arah kebijakan yang diterapkan dalam melaksanakan tujuan strategis ini melalui pengembangan SMK berbasis pusat keunggulan dengan detail fokus pengembangan pada sektor-sektor berikut:

- *SMK yang Dikembangkan Menjadi Pusat Keunggulan (Center Of Excellence) Prioritas Sektor Pemesinan dan Konstruksi.*

Pengembangan SMK sebagai COE sektor Pemesinan dan Konstruksi berfokus pada kompetensi keahlian: Teknik Pemesinan; Teknik Pengelasan; Teknik Otomasi Industri; Teknik Mekatronika; Teknik Kendaraan Ringan Otomotif; Teknik Alat Berat; Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan serta Teknik Geomatika. Pengembangan SMK COE tersebut difokuskan pada pemenuhan kebutuhan Ruang Praktik dan Peralatan praktik dengan standar industri sehingga SMK dapat menghasilkan produk barang/jasa serta dapat menjadi tempat pelatihan dan uji kompetensi. Jumlah SMK yang akan dijadikan COE sektor pemesinan dan konstruksi sebanyak 70 SMK. Dari 70 SMK yang telah dikembangkan pada Tahun 2020 akan menghasilkan produk-produk permesinan dan konstruksi. Di Tahun 2021 70 SMK CoE ini akan melatih guru-guru dari jurusan permesinan dan konstruksi dari SMK lain.

- *SMK yang Dikembangkan Menjadi Pusat Keunggulan (Center Of Excellence) Prioritas Sektor Hospitality*

Pengembangan SMK sebagai COE sektor Hospitality dengan fokus pengembangan kompetensi keahlian: Perhotelan; Tata Boga; Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian; Tata Kecantikan Kulit dan Rambut; Bisnis Daring dan Pemasaran; Retail; Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran. Pengembangan COE SMK tersebut difokuskan pada pemenuhan kebutuhan Ruang Praktik dan Peralatan praktik berstandar industry sehingga SMK dapat menghasilkan produk barang/jasa serta dapat menjadi tempat pelatihan dan uji kompetensi. Jumlah SMK yang akan dijadikan COE sektor Hospitality sebanyak 98 SMK sebagai pilot projek di tahun 2020.

- *SMK yang Dikembangkan Menjadi Pusat Keunggulan (Center Of Excellence) Prioritas Sektor Ekonomi Kreatif*

Pengembangan SMK sebagai COE sektor Ekonomi Kreatif dengan fokus pengembangan kompetensi keahlian: Rekayasa Perangkat Lunak; Animasi; Desain Komunikasi Visual; Tata Busana. Pengembangan COE SMK tersebut difokuskan pada pemenuhan kebutuhan Ruang Praktik dan Peralatan praktik berstandar industri sehingga SMK dapat menghasilkan produk barang/jasa serta dapat menjadi tempat pelatihan dan uji kompetensi. Jumlah SMK yang akan dijadikan COE sektor Ekonomi Kreatif sebanyak 90 SMK sebagai pilot projek di tahun 2020.

- *SMK yang Dikembangkan Menjadi Pusat Keunggulan (Center Of Excellence) Prioritas Sektor Care Service / Care Giver*

Pengembangan SMK sebagai COE sektor Care Service/Care Giver dengan fokus pengembangan kompetensi keahlian: Social Care; Caregiver (Perawatan Balita, Asisten Rumah Tangga, Perawat Lansia).

Sektor Care Service/Care Giver menjadi salah satu sektor yang cukup krusial untuk dikembangkan melihat fakta bahwa kebutuhan tenaga di bidang tersebut cukup besar baik kebutuhan di lingkup domestik maupun di lingkup internasional (sebagai tenaga migran). Salah satu negara yang membutuhkan jasa care giver cukup banyak adalah Jepang dimana diperkirakan sampai dengan tahun 2020 dibutuhkan sebanyak 1.000.000 tenaga kerja untuk sektor nurse dan careworker di Jepang . Ini salah satu peluang yang harus dimanfaatkan oleh SMK untuk mempersiapkan tenaga cerdas di bidang care service/care giver.

Pengembangan COE SMK tersebut difokuskan pada pemenuhan kebutuhan Ruang Praktik dan Peralatan praktik berstandar industri sehingga SMK dapat menghasilkan produk barang/jasa serta dapat menjadi tempat pelatihan dan uji kompetensi. Jumlah SMK yang akan dijadikan COE sektor Care Service/Care Giver sebanyak 10 SMK sebagai pilot projek di tahun 2020.

- *SMK yang Dikembangkan Menjadi Pusat Keunggulan (Center Of Excellence) Sektor Pendukung Pembangunan Nasional*

Pengembangan SMK sebagai COE sektor lainnya dengan fokus pengembangan kompetensi keahlian di luar 4 (empat) bidang prioritas di atas. Salah satu prioritas pada sektor ini adalah pengembangan SMK pertanian. Pengembangan SMK pertanian dimaksudkan untuk mendukung upaya Indonesia mewujudkan ketahanan pangan. Pengembangan COE SMK tersebut difokuskan pada pemenuhan kebutuhan Ruang Praktik dan Peralatan praktik berstandar industri sehingga SMK dapat menghasilkan produk barang/jasa serta dapat menjadi tempat pelatihan dan uji kompetensi. Jumlah SMK yang akan dijadikan COE sektor lainnya sebanyak 86 SMK sebagai pilot projek di tahun 2020.

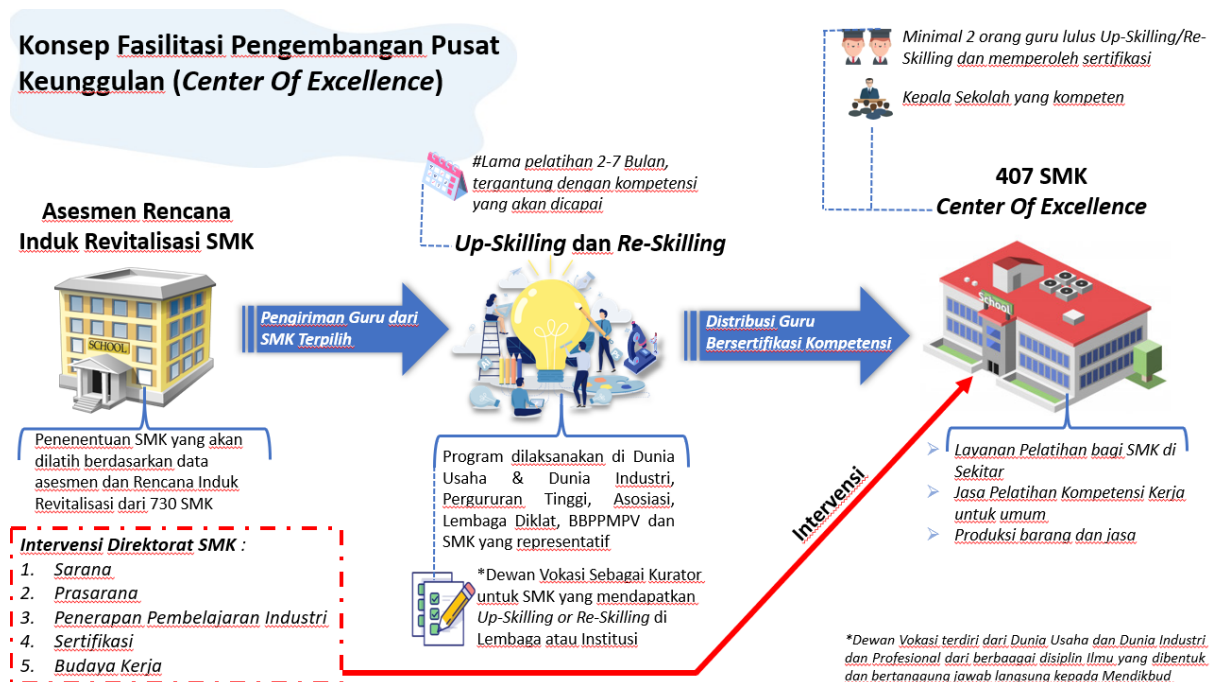
- *SMK yang Dikembangkan Menjadi Pusat Keunggulan (Center Of Excellence) di Papua/Papua Barat*

Pengembangan SMK sebagai COE dengan fokus mendukung percepatan pengembangan mutu SMK di daerah Papua/Papua Barat. Pengembangan COE SMK tersebut difokuskan pada pemenuhan kebutuhan Ruang Praktik dan Peralatan praktik berstandar industri. Jumlah SMK yang akan dijadikan COE di daerah Papua/Papua Barat sebanyak 2 (dua) SMK sebagai pilot projek di tahun 2020.

- *SMK yang Dikembangkan Menjadi Pusat Keunggulan (Center of Excellence) Kerjasama Luar Negeri*

Pengembangan SMK sebagai COE dengan fokus mendukung percepatan pengembangan mutu SMK melalui penyediaan fasilitas pembelajaran standar industri bagi sekolah yang sudah berkerjasama dengan luar negeri. Pengembangan COE SMK tersebut difokuskan pada pemenuhan kebutuhan Ruang Praktik dan Peralatan praktik berstandar industri sehingga SMK dapat menghasilkan produk barang/jasa serta dapat menjadi tempat pelatihan dan uji kompetensi. Pengembangan Pusat Keunggulan (COE) SMK Kerja Sama Luar Negeri ini fokus pada Fasilitas Pengembangan Pusat Keunggulan Sektor Listrik, Otomasi Industri dan Energi Terbarukan. Jumlah SMK yang akan dijadikan COE SMK ini sebanyak 51 SMK sebagai pilot projek di tahun 2020. Sebanyak 40 SMK akan dipilih pada sektor Kelistrikan, Otomasi Industri dan Energi Terbarukan sebagai wujud komitmen Perjanjian Kerjasama yang telah dilakukan antara Indonesia dengan Pemerintah Prancis (Schneider).

Adapun konsep revitalisasi yang akan dijalankan oleh Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan selama 5 tahun ke depan tergambar dari skema berikut ini:



Gambar 22. Skema Konsep Center of Excellence SMK

Penjelasan detail terhadap konsep SMK Center of Excellence dapat dilihat melalui runtutan strategi sebagai berikut :

- Pendataan sekolah yang memiliki SDM yang berkompeten, yaitu Kepala Sekolah, Guru, dan Tenaga Kependidikan. Guru sebagai tenaga pendidik merupakan guru yang berkompeten dengan dibuktikannya guru yang memiliki sertifikasi kompetensi yang diakui oleh industri. Selain guru, peningkatan kompetensi kepala sekolah dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan kepala sekolah dalam mengembangkan sekolah menjadi COE.

- Selanjutnya prasyarat pertama yang harus dipenuhi calon sekolah yang menjadi COE adalah memiliki sedikitnya 2 orang guru bersertifikat industri dari jurusan yang akan menjadi Center of Excellence di sekolah, bagi sekolah yang belum memiliki harus melatih guru di industri/P4TK yang sesuai atau mengajukan usulan ke Direktorat Kemitraan untuk mendapatkan bantuan pelatihan guru di industri;
- Setelah guru mendapatkan pelatihan industri selama 2-7 bulan, dan mendapatkan sertifikat serta otoritas untuk mensertifikasi, maka guru kembali ke sekolah dan membuat perencanaan semua kebutuhan untuk sekolah tersebut agar dapat menjadi Center of Excellence dengan target dapat menghasilkan produk serta pelatihan;
- Hasil perencanaan guru tersebut diusulkan ke Direktorat SMK sebagai proposal pengajuan bantuan SMK Center of Excellence;
- Direktorat SMK melakukan pengadaan peralatan yang diusulkan oleh SMK Center of Excellence yang sudah ditetapkan;
- Untuk mengantisipasi permasalahan khusus pengadaan barang di sekolah terkait regulasi, SDM dan waktu, maka dilakukan pembelanjaan melalui e-katalog;
- Antisipasi permasalahan ketersediaan peralatan yang dibutuhkan sekolah di e-katalog, dibutuhkan dukungan pihak LKPP untuk segera menayangkan peralatan yang dibutuhkan sekolah, khususnya dalam hal ini peralatan praktik SMK sebagai *Center of Excellence*. Direktorat SMK akan bekerjasama dengan LKPP untuk melengkapi jenis peralatan yang dibutuhkan;
- Dalam kasus pelaksanaan program di tahun 2020, pengecualian prosedur dapat dilakukan dengan pertimbangan keterlaksanaan program secara utuh di tahun anggaran berjalan dengan melakukan beberapa tahapan series menjadi paralel.

4. Peningkatan Tata Kelola Integratif SMK

a. Pembinaan SMK Negeri menjadi BLUD

SMK berperan penting dalam melengkapi pesatnya pembangunan yang bersifat fisik saat ini. Strategi pemerintah dari sebelumnya terkait pada pembangunan infrastruktur fisik, pada era digital sekarang ini berfokus kepada pembangunan sumber daya manusia. SMK merupakan sekolah yang menjadi andalan pemerintah dalam menyiapkan tenaga terampil. Selain kompetensi, siswa juga akan dilatih melalui *teaching factory* untuk dapat melakukan proses produksi selayaknya industri. Produk yang dihasilkan tidak lagi menjadi produk hasil praktik saja, tetapi juga menjadi produk yang dapat dipasarkan secara umum karena memenuhi standar industri. Melalui BLUD, SMK yang memiliki produk-produk unggulan dapat mengelola proses produksi di *teaching factory* secara lebih fleksibel tanpa melanggar peraturan. Disisi lain, siswa akan dilatih untuk memproses produksi selayaknya industri yang kemudian dapat dipasarkan secara umum karena memenuhi standar industri.

SMK-BLUD merupakan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang diberikan fleksibilitas berdasarkan prinsip efisiensi dan produktivitas dalam mengelola keuangan agar mampu memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat melalui pelaksanaan kegiatan peningkatan kompetensi siswa SMK dan kerjasama dengan industri, dunia usaha dan dunia kerja (IDUKA). Pada pelaksanaan operasional Sistem BLUD, sekolah mendapat hak prerogatif dalam mengimplementasikan praktik bisnis yang efektif agar tercipta peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Harapannya, kedepan SMK menjadi suatu lembaga mandiri yang dapat melakukan proses produksi dengan pengelolaan keuangan yang transparan dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan sekolah.

Dalam rangka melakukan pembinaan SMK menjadi BLUD, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan yakni:

1. Adanya payung hukum yang jelas terkait SMK menjadi BLUD;
 2. Adanya sosialisasi pentunjuk teknis (*Base Practice*) untuk memberikan pemahaman kepada daerah dan SMK yang diusulkan menjadi BLUD;
 3. Perlu adanya standarisasi dan strategi agar pelaksanaan BLUD di SMK dapat berjalan dengan maksimal;
 4. Perlu sinergitas antara pusat dan provinsi, baik terkait pelaksanaan BLUD maupun dalam menentukan target SMK yang akan menjadi BLUD. Pemerintah daerah juga perlu mendorong untuk membangun pendidikan daerah melalui anggaran APBD;
 5. Usulan calon SMK BLUD oleh daerah harus sesuai dengan kesiapan daerah dan mendapat persetujuan Gubernur / DPRD;
 6. Penetapan SMK menjadi BLUD dilaksanakan dengan menegakkan sistem transparansi dan akuntabilitas;
 7. 25 SMK yang telah menjadi BLUD agar menjadi SMK percontohan yang dapat membina sekolah-sekolah lain agar turut serta menjad SMK-BLUD;
- b. Penerapan Sistem Manajemen Mutu Tata Kelola

Peningkatan mutu pendidikan merupakan agenda utama dalam memenangkan persaingan di dunia pendidikan. Pendidikan yang berkualitas ditandai oleh lulusan yang memiliki kompetensi dan mampu bersaing dalam industri, dunia usaha dan dunia kerja. Perlu menjadi catatan bahwa pendidikan yang berkualitas hanya lahir dari implementasi sistem manajemen mutu tata kelola yang baik.

Sistem manajemen mutu tata kelola adalah kesatuan dari kebijakan, prosedur, manual, struktur organisasi, dan aturan-aturan lain untuk mengatur aktivitas-aktivitas yang terkait dengan mutu. Tujuan dari penerapan sistem manajemen di sekolah ini untuk memenuhi kebutuhan dan berorientasi demi kepuasan pelajar yang secara langsung menerima jasa, serta orang tua, Dinas Pendidikan, Bupati, dan Gubernur yang memiliki kepentingan langsung secara individu maupun institusi. Penerapan sistem manajemen mutu tata kelola diharapkan mampu memudahkan proses manajemen sekolah secara efektif dan efisien sehingga mampu meningkatkan kualitas pendidikan dan mengatasi

masalah pengangguran dan ketenagakerjaan yang hingga saat ini masih dikeluhkan oleh dunia usaha/dunia industri.

Agar sistem manajemen mutu tata kelola dapat terlaksana dengan baik, maka terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan yakni:

1. Perlu dilakukan “*perkawinan*“ antara SMK dengan industri untuk memastikan bahwa *outcome* yang dihasilkan oleh SMK benar dan sesuai dengan standar industri;
 2. Perlu adanya perubahan pola pikir terkait lulus SMK. Perlu ditanamkan bahwa lulusan SMK bukan semata-mata mencari kerja namun menjadi lulusan SMK yang menciptakan lapangan pekerjaan (*Entrepreneurship*);
 3. Penerapan sistem manajemen mutu tata kelola perlu diimbangi dengan peningkatan mutu kualitas internal, terutama guru. Hal ini dapat dilakukan dengan mengikutsertakan guru SMK dalam program magang di Industri;
 4. Pemerintah daerah diharapkan untuk menyusun peta jalan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan di daerah masing-masing serta mensosialisasikan *Supertax Deduction* terhadap industri untuk mengintegrasikan industri dengan SMK;
 5. Pemerintah daerah dihimbau untuk melakukan penetapan jabatan Kepala Sekolah dengan menjadikan “prestasi” sebagai syarat utama, tidak mengganti kepala sekolah terlalu sering dan atau tidak mengganti Kepala Sekolah yang sedang melaksanakan program COE;
- c. Kerjasama antar Lembaga dan Pemerintah Daerah

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagai salah satu lembaga pendidikan, mempunyai misi atau tujuan untuk menyiapkan tenaga kerja yang mampu mengisi lapangan kerja dan berkualitas profesional yang diharapkan mampu berperan sebagai alat unggulan bagi dunia usaha dan industri di Indonesia dalam menghadapi persaingan global. Agar lulusan SMK dapat meningkatkan kompetensi yang berkualitas maka dalam pelaksanaan proses pembelajaran SMK dan Industri, Dunia Usaha dan Dunia Kerja (IDUKA) perlu menjalin hubungan kerjasama agar penguasaan kemampuan belajar siswa tidak hanya didapatkan melalui kegiatan belajar di sekolah, namun juga melalui praktik di industri. Hal ini dilaksanakan agar pembelajaran dan pelatihan dapat berjalan sehingga menghasilkan lulusan yang handal, kompeten dan profesional sesuai bidang keahliannya. Prinsip kerjasama industri antara sekolah dengan dunia kerja pada akhirnya mempunyai tujuan untuk mempercepat waktu penyesuaian bagi lulusan sekolah kejuruan dalam memasuki dunia kerja yang pada akhirnya akan meningkatkan mutu sekolah menengah kejuruan.

Di sisi lain, pendidikan kejuruan juga menyita perhatian berbagai pihak, terutama *stakeholders* pendidikan. Oleh karena itu diperlukan intensitas kerjasama lebih lanjut untuk merekatkan kembali kerja sama antar lembaga. Hubungan kerjasama ini sangat diperlukan untuk mendukung terselenggaranya program SMK yang berkualitas. Beberapa hal yang menjadi perhatian agar kerjasama SMK dengan lembaga lainnya dapat berjalan dengan baik, yakni sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan pemetaan terkait profil guru SMK sehingga dapat tergambar seberapa banyak kebutuhan peningkatan kompetensi guru yang ada di setiap daerah;
2. Perlu dilakukan peningkatan jumlah peserta magang di industri, baik peserta magang dari kelompok siswa maupun dari kelompok guru;
3. Peningkatan sarana dan prasarana SMK guna meningkatkan mutu pendidikan SMK;
4. Perlu dilakukan kerjasama terkait pengadaan guru yang berkualitas sesuai program keahlian yang dibutuhkan SMK, serta pengadaan jurusan program studi di Perguruan Tinggi sesuai kebutuhan guru di SMK

Membuat role model kerjasama antara SMK dengan industri serta kerjasama antara industri dengan kementerian yang terkait.

d. Koordinasi dengan Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi (BBPPMPV)

Koordinasi yang dilakukan oleh Direktorat SMK dengan BBPPMPV adalah dalam konteks pembinaan guru kejuruan dalam rangka untuk mengatasi darurat guru kejuruan yang ada di Indonesia. Strategi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan transformasi organisasi BBPPMPV dengan mengembalikan fungsi utamanya hanya untuk mendidik guru kejuruan SMK yang banyak belum dilatih dan mengubah kelembagaannya menjadi sebuah lembaga Badan Layanan Umum (BLU) sehingga organisasi tersebut mampu mandiri dan lebih produktif dan kompetitif dalam menghasilkan guru-guru kejuruan yang handal di Indonesia.
2. Selain itu perlu dilakukan revitalisasi total BBPPMPV Kejuruan Kemdikbud dengan mengganti seluruh peralatan praktek training guru yang sudah sangat kuno dan lebih buruk dari peralatan di SMK saat ini. Kemudian perlu dilakukan penyediaan widyaiswara kejuruan yang sudah hampir seluruhnya pensiun dan belum ada pengantinya.
3. Mendorong terjadinya revitalisasi LPTK dan Politeknik yang menghasilkan guru kejuruan SMK agar guru kejuruan yang dihasilkannya kompeten karena lebih banyak praktek daripada teori.

3. KERANGKA REGULASI

Urgentitas Pengembangan kelembagaan melalui Regulasi BLUD SMK NEGERI

Kelembagaan SMK khususnya Sekolah Negeri harus ditransformasi menjadi sebuah entitas mandiri yang mampu mengelola dirinya sendiri tanpa adanya campur tangan politik sehingga lembaga SMK tersebut menjadi lebih profesional. BLU merupakan solusi yang ada dan dijamin oleh peraturan yang ada di Indonesia. Unit-unit yang sudah mendapat predikat sebagai BLU diberi beberapa keistimewaan yang tidak dimiliki oleh satuan kerja pada umumnya diantaranya sebagai berikut:

Pertama, BLU menganut pola anggaran fleksibilitas (*flexible budget*). Pola anggaran ini mengizinkan pemimpin BLU melakukan belanja lebih besar daripada yang ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran. Besarnya ambang batas fleksibilitas anggaran tentunya ditetapkan terlebih dahulu dalam dokumen Rencana Bisnis Anggaran tahunan sebagai dokumen perencanaan dan penganggaran BLU. Dalam mekanisme PPK-BLU, pendapatan yang berasal dari jasa layanan dapat dikelola secara langsung untuk membiayai kegiatan operasional. Sebaliknya menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2007, Satuan kerja non-BLU, yang memiliki Penerimaan Negara Bukan Pajak, wajib menyetor secepatnya ke Kas Rekening Negara. Istimewanya, BLU hanya perlu melaporkan jumlah penerimaan sekaligus mempertanggungjawabkan belanja yang sudah dilakukan melalui Surat Perintah Pengesahan Pertanggungjawaban Belanja (SP3B) minimal sekali dalam tiga bulan (Per-30/PB/2011). Singkatnya, selain tidak diwajibkan untuk menyetor PNBPNP secara langsung ke rekening Kas Negara, BLU diberi kewenangan untuk melampaui pagu anggaran dalam rangka menambah volume output kegiatan dalam satu periode anggaran. Namun perlu digarisbawahi bahwa pengeluaran BLU yang dapat dilampaui hanya yang sumber dananya berasal dari PNBPNP sesuai dengan ambang batas yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Bisnis Anggaran (RBA).

Kedua, BLU dapat memiliki saldo akhir tahun sebagai surplus kas. Surplus BLU terjadi apabila terdapat selisih lebih antara pendapatan operasional dengan pengeluaran rutin dalam satu tahun anggaran. Selain itu, pemimpin BLU dapat memanfaatkan saldo awal sebagai uang muka kerja sehingga dalam proses pelayanan publik tidak mengalami kekuarangan sumberdaya sebelum dokumen pelaksanaan anggaran dapat direalisasikan pada awal tahun. Ketentuan tersebut jelas sangat berbeda dengan aturan dalam pengelolaan keuangan berbasis satker dimana satker wajib menyetorkan saldo akhir tahun anggaran ke rekening kas Negara pada akhir tahun anggaran.

4. KERANGKA KELEMBAGAAN

Kerangka kelembagaan adalah perangkat institusi yang meliputi struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil negara. Kerangka kelembagaan disusun dengan tujuan antara lain:

- a) meningkatkan koordinasi pelaksanaan bidang-bidang pembangunan sebagaimana terdapat dalam RPJMN sesuai dengan fungsi dan visi/misi Kemendikbud;
- b) membangun struktur organisasi yang tepat fungsi dan ukuran untuk menghindari duplikasi fungsi dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi Kemendikbud dalam melaksanakan program-programnya; dan
- c) memperjelas ketatalaksanaan dan meningkatkan profesionalisme sumber daya aparatur.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 48 Tahun 2019 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Direktorat SMK mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan sekolah menengah kejuruan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat SMK menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang kurikulum, peserta didik, sarana dan prasarana, pendanaan, dan tata kelola sekolah menengah kejuruan;
- b) Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum, peserta didik, sarana dan prasarana, pendanaan, dan tata kelola sekolah menengah kejuruan;
- c) Peningkatan kualitas pendidikan karakter peserta didik sekolah menengah kejuruan;
- d) Fasilitasi sarana dan prasarana dan pendanaan sekolah menengah kejuruan;
- e) Fasilitasi pembangunan teaching factory dan technopark di lingkungan sekolah menengah kejuruan;
- f) Pemberian pertimbangan izin dan kerja sama penyelenggaraan sekolah menengah kejuruan yang diselenggarakan perwakilan negara asing atau lembaga asing;
- g) Pelaksanaan penyelarasan kejuruan dan fasilitasi kerja sama industri;
- h) Fasilitasi pelaksanaan penjaminan mutu sekolah menengah kejuruan;
- i) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kurikulum, peserta didik, sarana dan prasarana, pendanaan, dan tata kelola sekolah menengah kejuruan;
- j) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kurikulum, peserta didik, sarana dan prasarana, pendanaan, dan tata kelola sekolah menengah kejuruan;
- k) Pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang kurikulum, peserta didik, sarana dan prasarana, pendanaan, dan tata kelola sekolah menengah kejuruan; dan
- l) Pelaksanaan administrasi direktorat.

The background features a stylized cityscape with various buildings and trees. Overlaid on this are several large, semi-transparent, colorful shapes: a large orange semi-circle at the top, a pink semi-circle on the left, a light green semi-circle on the right, and a blue semi-circle at the bottom. A dark grey rectangular box is centered over the orange and pink shapes, containing the text 'BAB IV'. Below it, a blue rectangular box contains the text 'TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN'.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

1. TARGET KINERJA

Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020-2024 adalah bagian dari sistem perencanaan dan penganggaran Pemerintah, seperti yang diperintahkan oleh Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Renstra merupakan persyaratan utama bagi upaya mewujudkan akuntabilitas dan transparansi serta peningkatan mutu keluaran (output) dan hasil (outcome) dalam pemanfaatan APBN. Renstra akan menjadi acuan (guidance) pelaksanaan program dan kegiatan bagi setiap pimpinan unit kerja agar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya semakin akuntabel (accountable). Renstra saat ini adalah bagian dari konsistensi penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja.

Renstra menggambarkan keterkaitan antara sasaran kementerian, sasaran program, dan sasaran kegiatan dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS), Indikator Kinerja Program (IKP) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Penetapan target kinerja ditentukan setelah IKSS, IKP, dan IKK disusun dan disepakati baik di tingkat kementerian maupun di tingkat Direktorat Jenderal. Target kinerja menunjukkan tingkat sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai oleh Kementerian, program, dan kegiatan dalam periode 2020—2024. Oleh karena itu Kemendikbud di dalam menyusun dan menetapkan target kinerja mengacu dan memperhatikan beberapa kriteria, yaitu:

- a. Target kinerja harus dapat menggambarkan angka kuantitatif dan satuan yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja sasaran (IKSS, IKP, dan IKK);
- b. Penetapan target dipilih karena relevan karena relevan dengan indikator kerjanya, logis dan berdasarkan pada baseline data yang jelas.

Dalam sistem perencanaan dan penganggaran saat ini, setiap Direktorat Jenderal diharapkan menetapkan satu program dengan satu atau lebih sasaran program dan dilengkapi dengan IKP dari masing-masing sasaran program, sedangkan Direktorat SMK dimungkinkan memiliki satu atau lebih kegiatan dengan masing-masing kegiatan memiliki satu atau lebih sasaran kegiatan sesuai dengan karakteristik tugas dan fungsinya yang dilengkapi dengan IKK untuk masing-masing sasaran kegiatan. Target kinerja program di setiap Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi dan target kinerja kegiatan di seluruh Direktorat SMK harus mencerminkan target kinerja kementerian dan program prioritas nasional.

Berikut ini adalah rincian turunan Rencana Strategis dari Direktorat Jenderal sampai dengan unit Direktorat SMK. Direktorat SMK masuk dalam salah satu satuan kerja yang ada di Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. Berikut ini merupakan penjabaran derivatif dari Renstra unit Direktorat Jenderal yang kemudian akan diteruskan sampai dengan satuan kerja Direktorat SMK.

023.18.15	Program Pendidikan Vokasi	Satuan	Baseline	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
SP 4.1	Meningkatnya jumlah lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi yang memperoleh pekerjaan dan berwirausaha dalam satu tahun setelah kelulusan							
IKP 4.1.1	Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha	%	42	45	48	52	56	60
IKP 4.1.2	Persentase pekerja lulusan SMK dengan gaji minimum sebesar 1x UMR	%	64,3	65,4	66,5	67,7	68,8	70
SP 4.2	Meningkatnya pendidikan SMK yang berstandar industri							
IKP 4.2.2	Persentase SMK yang dikembangkan menjadi Center of Excellence (COE) per bidang keahlian	%		2	4	6	8	10
IKP 4.2.4	Persentase SMK yang memperoleh status BLUD	%	0,2	1	1,3	1,7	2,1	2,5
IKP 4.2.5	Persentase SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory	%	5	5	8	11	15	20
SP 4.3	Terwujudnya Pendidikan Tinggi Vokasi yang berkualitas dan berstandar industri							
IKP 4.3.1	Jumlah SDM Pendidikan Tinggi Vokasi yang mengikuti Peningkatan Kompetensi	orang		300	600	900	1200	1500

023.18.15	Program Pendidikan Vokasi	Satuan	Baseline	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
IKP 4.3.2	Persentase Pendidikan Tinggi Vokasi yang sumber daya (resources) nya dimanfaatkan oleh stakeholders dalam konteks kerjasama profesional	%		20	30	50	75	90
IKP 4.3.3	Jumlah Pendidikan Tinggi Vokasi yang berstatus PTNBH	lembaga	0	1	2	3	4	5
IKP 4.3.4	Jumlah Pendidikan Tinggi Vokasi yang sudah menjadi Badan Layanan Umum (BLU)	lembaga	2	3	4	5	6	7
SP 4.4	Terwujudnya Pelatihan Vokasi yang sesuai dengan kebutuhan dan standar industri							
IKP 4.4.1	Jumlah SDM Lembaga kursus dan pelatihan yang sudah dilatih oleh industri	orang		300	400	500	600	700
SP 4.5	Terwujudnya tata kelola Ditjen Vokasi yang berkualitas							
IKP 4.5.1	Predikat SAKIP Ditjen Vokasi minimal BB	predikat	BB	BB	BB	A	A	A
IKP 6.5.2	Jumlah Satker di Ditjen Pendidikan Vokasi mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	satker		1	5	10	20	30

Berikut ini adalah turunan Indikator Kinerja Kegiatan yang merupakan turunan dari Indikator Kinerja Program tahun 2020 – 2024 yang dijadikan sebagai output yang ingin dicapai untuk mendukung sasaran program yang tentunya pula merupakan indikator derivatif dari Sasaran Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Berikut ini adalah IKK Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan:

KODE	IKP-IKK	SATUAN	BASELINE 2019	2020	2021	2022	2023	2024
IKK	Jumlah SMK yang Mendapatkan Fasilitas Pengembangan Sarana Prasarana	sekolah		268	292	280	280	280
IKK	Jumlah SMK yang melibatkan praktisi profesional industri dalam proses pembelajaran	sekolah		268	560	840	1.120	1.400
IKK	Jumlah SMK yang menawarkan program 4 tahun (lulus dengan gelar D2)	sekolah	0	101	152	202	253	303
IKK	Jumlah SMK yang memperoleh pembinaan untuk memperoleh status BLUD	sekolah	25	65	65	65	65	65
IKK	Jumlah SMK yang memperoleh pembinaan untuk menyelenggarakan <i>Teaching Factory</i>	sekolah	700	-	420	420	560	700

Peningkatan kualitas SDM dilakukan untuk menghadapi tantangan digitalisasi dan perubahan pekerjaan ke depan (*future of work*) salah satunya melalui upaya perbaikan sistem Pendidikan SMK. Sesuai arahan RPJPN Tahun 2005–2025, sasaran pembangunan jangka menengah tahun 2020–2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing. Kebijakan ini merupakan upaya dalam mendukung dunia kerja agar lebih geliat dalam mengembangkan usahanya terlebih setelah adanya pandemic Covid-19.

Adanya dunia kerja yang terlibat aktif sebagai mitra bagi satuan pendidikan SMK dalam penyelarasan kurikulum, mitra pelaksanaan *teaching factory*, pengiriman guru/instruktur tamu profesional, pelaksanaan sertifikasi kompetensi, magang serta praktik lapangan dengan mengedepankan asas profesional dan mutual. Beberapa SMK dikembangkan menjadi pusat keunggulan untuk mengimplementasikan transformasi SMK dalam menghasilkan lulusan yang link and match dengan dunia kerja melalui:

1. Pemenuhan SDM terampil melalui lulusan SMK yang dipersiapkan untuk dapat segera bekerja dan atau berwirausaha setelah menamatkan pendidikan, bekal kompetensi kejuruan yang diperoleh baik pada pelaksanaan teaching factory, pembelajaran berbasis project based learning, pengalaman pembelajaran diluar sekolah/magang, serta sertifikasi kompetensi dari dunia industry yang memiliki dampak terlihat dengan cara: peningkatan persentase lulusan SMK yang berhasil memperoleh kompetensi sesuai harapan dunia kerja mencapai target 20% (tahun 2020 sebagai based line), meningkat menjadi 33% ditahun 2022, kemudian 36% ditahun 2023, dan diharapkan sampai tahun 2024 sebanyak 40% lulusan SMK yang bekerja dan atau berwirausaha.
2. Penguatan kurikulum dan pelaksanaannya, dengan cara: mendorong jumlah partisipan SMK yang menerapkan kurikulum merdeka belajar yaitu melaksanakan akselerasi kurikulum dengan dunia kerja sesuai konsep link and match sehingga mampu menyelenggarakan teaching factory sesuai target capaian 6% (tahun 2020 sebagai baseline), sebanyak 24% SMK ditahun 2022, kemudian sebanyak 36% SMK ditahun 2023, dan diharapkan sampai dengan tahun 2024 sebanyak 48% SMK diseluruh Indonesia.

Adanya perubahan kebijakan sehingga dilakukan revisi terhadap ukuran capaian keberhasilan kinerja untuk Direktorat SMK. Pengukuran keberhasilan pencapaian target Pendidikan SMK dilakukan dengan rumusan indikator kinerja dan target tahunan untuk periode tahun 2022 - 2024 pencapaian yang dijabarkan adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Base line 2020	Target		
				2022	2023	2024
IKK 1.1	Persentase lulusan SMK yang berhasil memperoleh kompetensi yang sesuai dengan dunia kerja	%	20	20	36	40
IKK 1.2	Persentase SMK yang menerapkan pembelajaran link and match dengan dunia kerja	%	6	24	36	48

2. KERANGKA PENDANAAN

Kerangka pendanaan dalam melakukan pembangunan SMK tahun 2020-2024 adalah dengan menggunakan kontribusi APBN melalui alokasi pagu untuk Direktorat SMK dan Dana Transfer Daerah yang bersumber dari alokasi Dana Alokasi Khusus Fisik serta APBD.

3. SISTEM PEMANTAUAN DAN EVALUASI

1. Tujuan Pemantauan dan Evaluasi

Sistem pemantauan dan evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari implementasi Renstra. Pemantauan dan evaluasi bertujuan untuk mengetahui tingkat pencapaian dan

kesesuaian antara rencana yang telah ditetapkan dalam Renstra Kemendikbud Tahun 2020-2024 dengan hasil yang dicapai berdasarkan kebijakan yang dilaksanakan secara berkala melalui kegiatan dan/atau program pendidikan dan kebudayaan di setiap satuan, jenjang, jenis, dan jalur pendidikan formal dan nonformal.

2. Prinsip-Prinsip Pemantauan dan Evaluasi

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a) kejelasan tujuan dan hasil yang diperoleh dari pemantauan dan evaluasi;
- b) pelaksanaan dilakukan secara objektif;
- c) dilakukan oleh petugas yang memahami konsep, teori, dan proses serta berpengalaman dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi agar hasilnya sah dan handal;
- d) pelaksanaan dilakukan secara terbuka (transparan) sehingga pihak yang berkepentingan dapat mengetahui hasil pelaporan melalui berbagai cara;
- e) melibatkan berbagai pihak yang dipandang perlu dan berkepentingan secara proaktif (partisipatif);
- f) pelaksanaan dapat dipertanggung-jawabkan secara internal dan eksternal (akuntabel);
- g) mencakup seluruh objek agar dapat menggambarkan secara utuh kondisi dan situasi sasaran pemantauan dan evaluasi (komprehensif);
- h) pelaksanaan dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan pada saat yang tepat agar tidak kehilangan momentum yang sedang terjadi;
- i) dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan;
- j) berbasis indikator kinerja; dan
- k) pelaksanaan dilakukan secara efektif dan efisien, artinya target pemantauan dan evaluasi dicapai dengan menggunakan sumber daya yang ketersediaannya terbatas dan sesuai dengan yang direncanakan.

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi mencakup berbagai aspek sebagai berikut: 1) penjaminan mutu, relevansi, dan daya saing; 2) pemerataan dan perluasan akses pendidikan menengah dan tinggi; 3) peningkatan tata kelola, akuntabilitas, dan kemitraan pendidikan dan kebudayaan. Pemantauan dan evaluasi dapat dilakukan oleh pemerintah, BSNP, LPMP, dinas pendidikan dan kebudayaan provinsi, dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten dan kota, dinas pendidikan dan kebudayaan kecamatan, dan satuan pendidikan.

5. Ruang Lingkup Pemantauan dan Evaluasi

Implementasi pemantauan dan evaluasi yang sudah berjalan di lingkungan Kemdikbud meliputi:

- a. pemantauan dan pengendalian program bulanan dan triwulanan,

- b. evaluasi tematik yang berkaitan dengan kebijakan Kemdikbud,
- c. evaluasi kinerja tahunan melalui sistem LAKIP,
- d. evaluasi kinerja tengah periode Renstra melalui pencapaian kinerja Kemdikbud, dan
- e. evaluasi akhir masa Renstra.

6. Pemantauan dan Evaluasi oleh Pemerintah

Sesuai dengan PP 39 Tahun 2006 tentang tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan, pemantauan dan evaluasi dilaksanakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah serta institusi lain yang berkompeten.

Untuk mendukung pelaksanaan PP Nomor 39 Tahun 2006, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menerbitkan Permendikbud Nomor 42 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Sistem E-Monitoring Serapan Anggaran untuk Pemantauan dan Pengendalian Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Anggaran di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Salah satu pasal dalam Permendikbud tersebut mengamanatkan bahwa setiap satker yang memanfaatkan APBN wajib melaporkan secara *online* setiap perkembangan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran kepada atasan satker dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebagai penanggung jawab anggaran fungsi pendidikan.

Selain itu, hasil pemantauan dan evaluasi juga dapat digunakan sebagai masukan bagi BSNP, BAN-SM, BAN-PT, BAN-PNF, dan lembaga sertifikasi kompetensi untuk meningkatkan kinerja badan-badan tersebut dalam melaksanakan standardisasi, akreditasi, penjaminan dan pengawasan mutu, pemantauan dan evaluasi program, kegiatan serta hasil belajar tingkat nasional.

7. Pemantauan dan Evaluasi Renstra oleh SKPD Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta Satuan Pendidikan

Pemantauan dan evaluasi Renstra dilakukan secara berjenjang sebagai berikut:

- *Pemantauan dan Evaluasi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tingkat Provinsi*
Pemantauan dan evaluasi oleh pemerintah provinsi digunakan untuk: (i) mengukur tingkat pencapaian target pembangunan pendidikan dan kebudayaan provinsi; (ii) memperbaiki kinerja aparatur Pemda Kabupaten dan Kota, Kecamatan, dan satuan pendidikan; dan (iii) meningkatkan kemampuan dan kesanggupan aparatur pemda provinsi dalam melaksanakan tugas pemantauan dan evaluasi.
- *Pemantauan dan Evaluasi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten dan Kota*
Pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten dan kota bertujuan untuk: (i) mengukur tingkat pencapaian target pembangunan pendidikan pada kabupaten dan kota tersebut sesuai dengan Renstra SKPD kabupaten dan kota kurun waktu 2020-2024; (ii) memperbaiki kinerja aparatur pemda kecamatan dan

satuan pendidikan agar kapabilitas dan kapasitas dalam penyelenggaraan pendidikan makin meningkat; dan (iii) meningkatkan kemampuan dan kesanggupan aparatur pemda kabupaten dan kota dalam melaksanakan tugas pemantauan dan evaluasi.

- *Pemantauan dan Evaluasi oleh Satuan Pendidikan dan Kebudayaan*

Fungsi pemantauan dan evaluasi dalam satuan pendidikan dan kebudayaan adalah untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan pada satuan pendidikan dan kebudayaan yang bersangkutan secara berkala, yang hasilnya dapat digunakan untuk memperbaiki kinerja.

- *Pemantauan dan Evaluasi oleh Badan Standar Nasional Pendidikan dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan*

Pemantauan yang dilakukan BSNP bertujuan mengevaluasi capaian Standar Nasional Pendidikan. Sementara itu, pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan adalah untuk mendapatkan pemetaan capaian standar nasional yang dijadikan dasar dalam mengembangkan model intervensi, untuk meningkatkan kualitas pendidikan sehingga mencapai standar nasional serta membantu BAN-SM, BAN-PNF, dan BAN-PT dalam mengakreditasi satuan pendidikan.

The background features a stylized cityscape with various buildings and trees. Overlaid on this are several large, semi-transparent semi-circles in shades of orange, pink, yellow, and blue. A dark grey horizontal bar is positioned across the middle of the image, containing the text 'BAB V' in white. Below this bar, a larger, semi-transparent grey bar contains the word 'PENUTUP' in white, bold, uppercase letters.

BAB V

PENUTUP

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan tahun 2020-2024 ini dibuat dalam rangka memberikan panduan dan arah untuk Direktorat dalam melakukan implementasi program kerja untuk pembinaan pelayanan pendidikan menengah kejuruan demi mewujudkan layanan dan pengelolaan pendidikan yang berkualitas serta bermutu sehingga bisa menghasilkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang berkapabilitas untuk mendorong pembangunan nasional. SDM yang berkualitas merupakan salah satu faktor majunya suatu bangsa. Terlebih prioritas pembangunan nasional periode 2020-2024 adalah terkait percepatan pembangunan SDM berkualitas. Melalui Renstra inilah manifestasi dari upaya Direktorat mendorong pembangunan tersebut.

Renstra ini merupakan kesinambungan dari Renstra Direktorat SMK Tahun 2014-2019. Penyusunan Renstra Direktorat SMK Tahun 2020-2024 ini dilakukan melalui berbagai tahapan, antara lain mengidentifikasi, verifikasi, menganalisis data, termasuk koordinasi dengan unit kerja di lingkup Direktorat, unsur dunia usaha dan industri, pemerhati pendidikan kejuruan, Universitas dan partisipasi seluruh pejabat di lingkungan Direktorat SMK. Renstra ini juga telah mengakomodasi semua tugas dan fungsi Direktorat SMK sesuai dengan Permendikbud Nomor 9 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Renstra Direktorat SMK Tahun 2020-2024 digunakan sebagai basis pedoman dan arah pengembangan dan pembangunan pendidikan menengah kejuruan, serta merupakan dasar dan acuan untuk menyusun (1) Rencana Kerja (Renja) dan RKA-KL; (2) Koordinasi perencanaan dan pengendalian kegiatan; (3) Laporan Tahunan; dan (4) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Renstra ini adalah manifestasi dari peta jalan pengembangan pendidikan yang akan dilaksanakan pada periode 2020-2024.

Pada intinya, yang merupakan esensi dari pemerintah sebagai penyelenggara pendidikan adalah memberikan pelayanan pendidikan yang berkualitas sesuai dengan amanah konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 bahwa “warga negara berhak atas pendidikan” dan negara wajib mencerdaskan kehidupan bangsa dan strategi untuk merealisasikan hal tersebut adalah dengan pendidikan yang berkualitas.

Semoga dengan dibuatkannya renstra ini dapat berkontribusi secara kontinyu untuk kemajuan pendidikan nasional khususnya pendidikan menengah kejuruan.



Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan
Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan